



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP.6050/PR.002/DRJD/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024, Renstra Unit Kerja Eselon I disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020 - 2024**
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**
Pelaksana Tugas,



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414 200502 1 001



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2020-2024). Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Adapun muatan dari dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.

Dengan ditetapkannya Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini, maka seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 2020-2024 diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini, jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Jakarta, 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	1
1.1.2 Capaian RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019...	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	7
2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	7
2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	9
2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	10
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	11
2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	12
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	15
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	19
3.3.1 Arah Kebijakan Penanganan Isu Strategis Nasional.....	19
3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran	20
3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024.....	26
3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat	26
3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat.....	27
3.5 Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	30
3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat.....	30
3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat.....	30
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
4.1 Target Kinerja Program Infrastruktur Konektivitas Darat Tahun 2020-2024	36
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Program	36



4.1.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Pelaksanaan Kegiatan.....	37
4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	38
4.2.1 Kebutuhan Pendanaan.....	38
4.2.2 Skema Pendanaan.....	39
BAB 5 PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Arahan Pimpinan	40
5.3 Mekanisme Evaluasi.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	1
Tabel 1.2	Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.3	Pencapaian Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019	3
Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	20
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 3.4	Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 3.5	Daftar BP2TD dan BPTD.....	32
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Program Infrastruktur Konektivitas.....	36
Tabel 4.2	Target Proyek Strategis/Keluaran (Output) RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	5
Gambar 1.2	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	6
Gambar 1.3	Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	6
Gambar 2.1	Visi Presiden RI dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional	7
Gambar 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024.....	9
Gambar 2.3	Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	10
Gambar 2.4	Startegy Map Program-Kegiatan Ditjen Perhubungan Darat	13
Gambar 3.1	9 (sembilan) <i>Major Project</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....	15
Gambar 3.2	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	15
Gambar 3.3	Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	21
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)	30
Gambar 3.5	Struktur Organisasi BP2TD dan BPTD	33
Gambar 3.6	Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Transportasi Perkotaan	35
Gambar 4.1	Skema Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2020-2024**
- Lampiran II Matriks Proyek Prioritas Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2020-2024**
- Lampiran III Peta Proyek Prioritas Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2020-2024**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kondisi Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggambarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai batasan ruang lingkup, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 122 TAHUN 2018
1	Kedudukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Direktorat Perhubungan Darat merupakan Unit Organisasi Setingkat Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal
2	Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	a. <u>Perumusan kebijakan</u> di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat; b. <u>Pelaksanaan kebijakan</u> di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat; c. <u>Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria</u> di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat; d. <u>Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi</u> di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan



NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 122 TAHUN 2018
		angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
		e. <u>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</u> di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
		f. <u>Pelaksanaan administrasi</u> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
		g. <u>Pelaksanaan fungsi lain</u> yang diberikan oleh Menteri.

Sumber: pasal 134, 135, 136, dan 137 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di atas, maka cakupan bidang transportasi darat yang pengelolaan dan penyelenggaraannya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari *penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda dan keselamatan transportasi darat*. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024.

Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.



1.1.2 Capaian RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019

Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2010-2014. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diukur melalui Indikator Kinerja Program. Adapun capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI S.D 2018	TARGET S.D 2019
Rasio konektivitas antar wilayah	0,676	0,659
Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan*	82,69%	100%
On Time Performance (OTP) transportasi darat	89,28%	83,25%
Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi darat	17,88%	40,77%
Rasio pelayanan transportasi darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	0,49	0,52

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Ket:

*) dihitung berdasarkan kota yang mendapatkan bantuan bus BRT

Dalam mewujudkan Sasaran Program di atas, Capaian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat diproyeksikan sebesar 72,55%. Secara garis besar hasil capaian pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pencapaian Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI	TARGET
1	Pembangunan Terminal			
	-Baru	Lokasi	13	21
	-Lanjutan	Lokasi	27	33
2	Rehabilitasi Terminal	Lokasi	83	119
3	Pembangunan UPPKB			
	-Baru	Lokasi	0	3
	-Lanjutan	Lokasi	2	2
4	Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	71	111
5	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Provinsi	2.063	2.063
6	Pembangunan ATCS	Lokasi	25	35
7	Pembangunan BRT	Unit	2.137	2.390
8	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan			



NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI	TARGET
	-Baru	Lokasi	24	36
	-Lanjutan	Lokasi	83	83
9	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	55	53
10	Pembangunan Pelabuhan Sungai			
	-Baru	Lokasi	15	23
	-Lanjutan	Lokasi	19	19
11	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Lokasi	25	41
12	Pembangunan Pelabuhan Danau			
	-Baru	Lokasi	8	17
	-Lanjutan	Lokasi	20	19
13	Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Lokasi	12	18
14	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis			
	-Baru	Unit	16	22
	-Lanjutan	Unit	18	18
15	Penyediaan SBNP	Unit	78	146
16	Pelayanan Angkutan Jalan Perintis	Trayek	291	291
17	Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis	Lintas	222	249

Sumber: Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat Kabinet Jokowi Periode Tahun 2015-2019 (2019)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Hingga tahun 2019, Kementerian Perhubungan, pada sektor perhubungan darat telah mengoperasikan sebanyak 310 trayek angkutan jalan perintis dan 213 lintas penyeberangan, sedangkan untuk Tahun 2018 dioperasikan sebanyak 296 trayek angkutan jalan perintis dan 222 lintas penyeberangan. Penurunan pelayanan lintas penyeberangan perintis pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya 16 lintas perintis yang dikelola oleh operator pengelola (BUMD) Kapal tersebut tidak dapat mengoperasikan kembali kapalnya dikarenakan ketidaksanggupan mengaktifkan kembali dokumen kapal dengan melakukan docking yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Secara umum trayek-trayek tersebut telah mampu menjangkau hingga sekitar 114 daerah tertinggal, terpencil, dan terluar di seluruh NKRI (atau 74%) dari total 152 daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

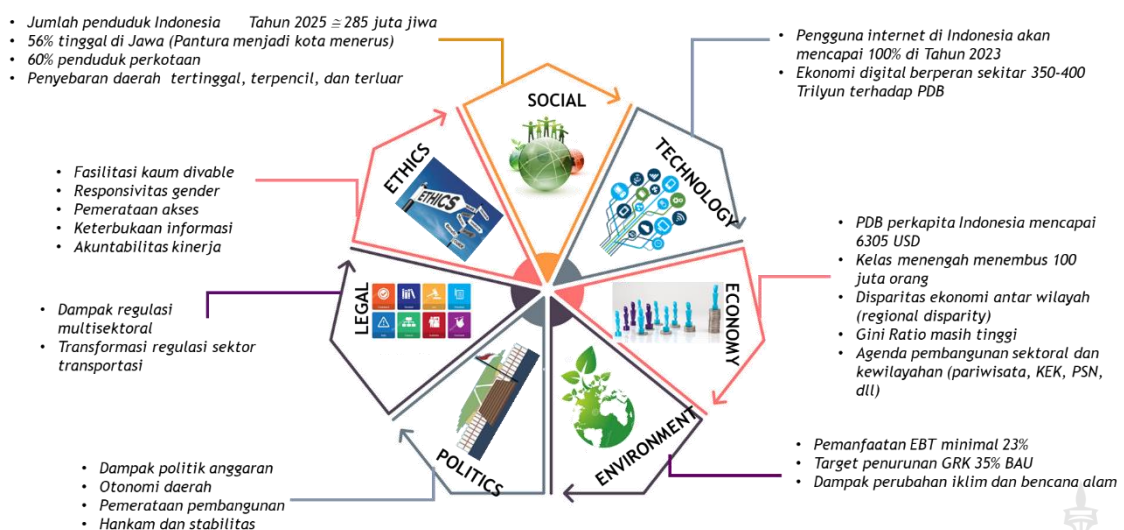


Sementara, subsidi angkutan orang perintis dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal, daerah yang tidak memiliki layanan angkutan jalan dan daerah dengan pelayanan angkutan jalan yang secara ekonomi tidak mencapai nilai keekonomiannya (tidak menguntungkan). Pelayanan angkutan jalan perintis dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan 74 trayek di 12 provinsi, sampai tahun 2018 angkutan jalan perintis telah melayani 296 trayek di 32 provinsi, pada tahun 2019 jumlah pelayanan meningkat menjadi 307 trayek di 32 provinsi dengan 41% trayek berada di Indonesia Bagian Timur. Secara umum pelayanan angkutan jalan perintis memberikan manfaat dalam:

1. Meningkatkan perekonomian suatu daerah yang telah dilayani oleh angkutan jalan perintis dengan mempermudah akses warga sekitar yang terisolir menuju pusat perekonomian di pusat kota;
2. Memberikan akses dan kemudahan belajar di daerah yang dilintasi trayek angkutan jalan perintis dalam menjangkau sekolahnya;
3. Menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani serta membantu melayani angkutan di lokasi pasca bencana alam.

Lingkungan strategis merupakan potensi yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lingkungan strategis diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, legal/hukum, dan etika/budaya.

Aspek sosial menggambarkan kondisi sosial masyarakat sebagai *customer* yang harus dilayani transportasi darat. Aspek teknologi menggambarkan perkembangan teknologi bidang transportasi darat yang perlu diakomodir dan/atau dimanfaatkan. Aspek ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan dan kondisi ekonomi ke depan dalam mengukur potensi pendanaan ke depan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan sebagai target melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Aspek politik tidak lepas dari proses prioritas pembangunan. Aspek legal/hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Serta, aspek etika/budaya menjadi dasar pertimbangan pelayanan yang diberikan.



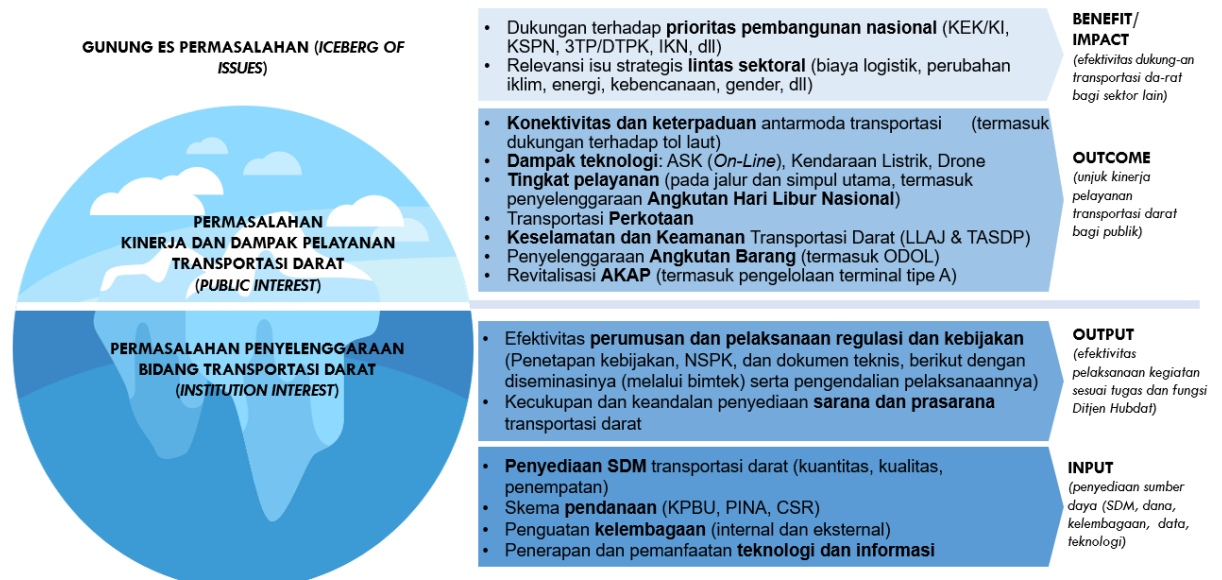
Gambar 1.1 Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada **Gambar 1.2**. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (*public interest* atau isu eksternal) dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (*institution interest* atau isu internal), terdiri dari isu strategis yang bersifat *Impact*, *Outcome*, *Ouput*, dan *Input* sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 1.3**.



Gambar 1.2 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024



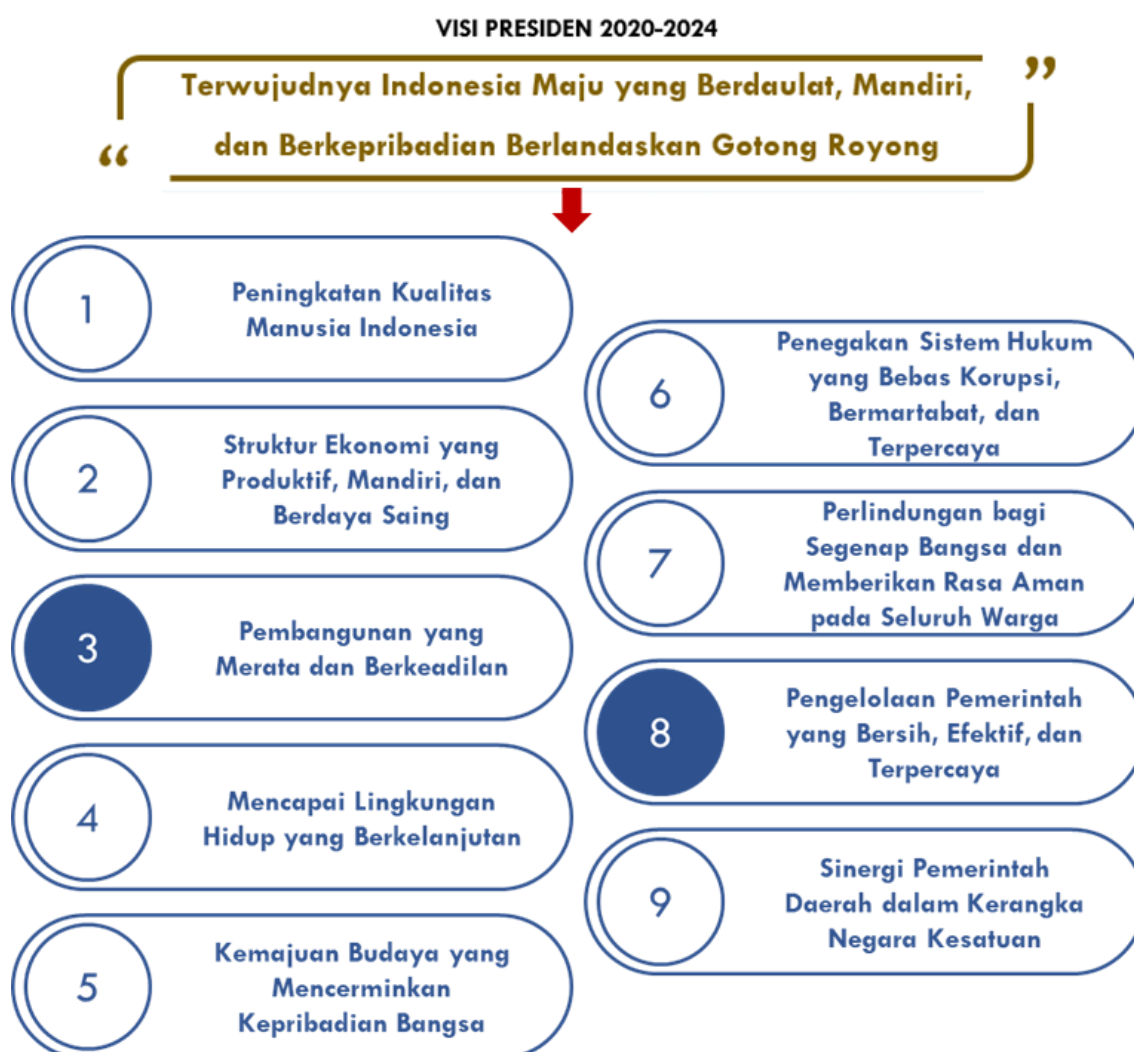
Gambar 1.3 Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024



BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia menjadi landasan dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang merupakan dasar, perencanaan pembangunan periode 2020-2024. Visi Misi Presiden selanjutnya dirumuskan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 2.1**. Adapun Visi Presiden RI dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden RI





Gambar 2.2 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

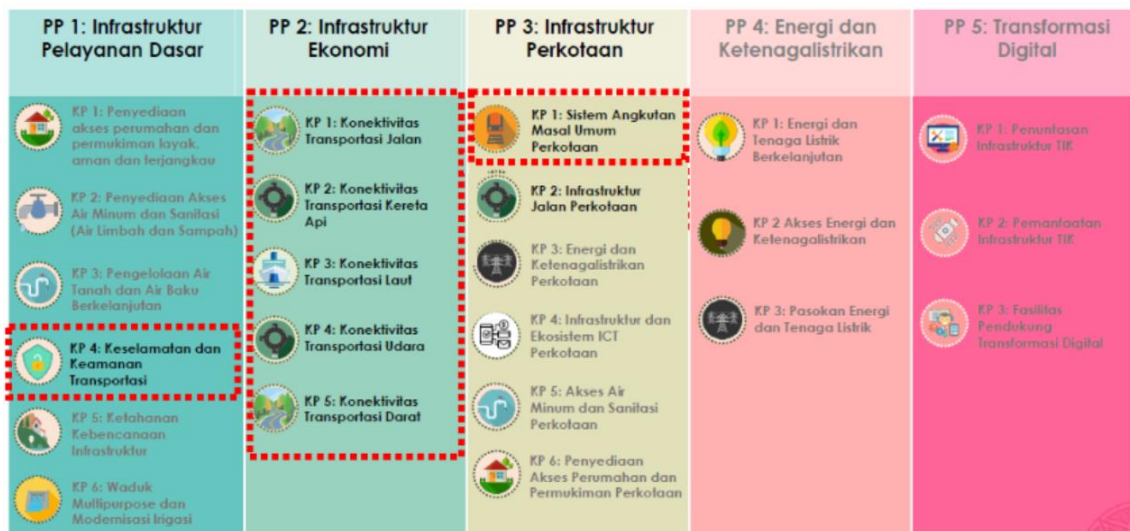
Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. PP – Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2, dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2)
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2)
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2)
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2)
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3)





Gambar 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI 2020-2024

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang berkonektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan



produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective (SP)*, yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
- *Customer Perspective (CP)*, yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (*outcome*) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (*user*) dalam hal ketersediaan (*existence/accessibility and capacity*), pelayanan (*time, cost, quality, punctuality, etc*), serta keselamatan dan keamanan (*safety and security*). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level *Stakeholders Perspective (SP)*;
- *Internal Business Perspective (IBP)*, yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (*customer perspective/CP*) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (*stakeholders perspective/SP*). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat).
- Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (*POAC/planning, organizing, actuating, and controlling*) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat.
- *Learning and Growth Perspective (LGP)*, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (*basic capital*) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.



- Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.3** sebagai berikut.

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS (SS1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional	SASARAN STRATEGIS (SS2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SASARAN STRATEGIS (SS3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konektivitas Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
INTERNAL PROCESS'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan /ditetapkan		
LEARN & GROWTH'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan		

Gambar 2.3 Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Menjabarkan Visi dan Misi Presiden RI yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.



Dalam mengukur keberhasilan setiap tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 yang bersifat *outcome*. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio konektivitas transportasi darat (rasio) sebesar 0,930 pada tahun 2024;

2. Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat (indeks) sebesar 80 pada tahun 2024;

3. Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio kejadian kecelakaan transportasi darat per 1 juta keberangkatan (kecelakaan per 1 juta keberangkatan) sebesar 0,047 pada tahun 2024.

2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode 2020-2024 adalah:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Dukungan Manajemen

SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

SK.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

SK.2 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat

SK.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat

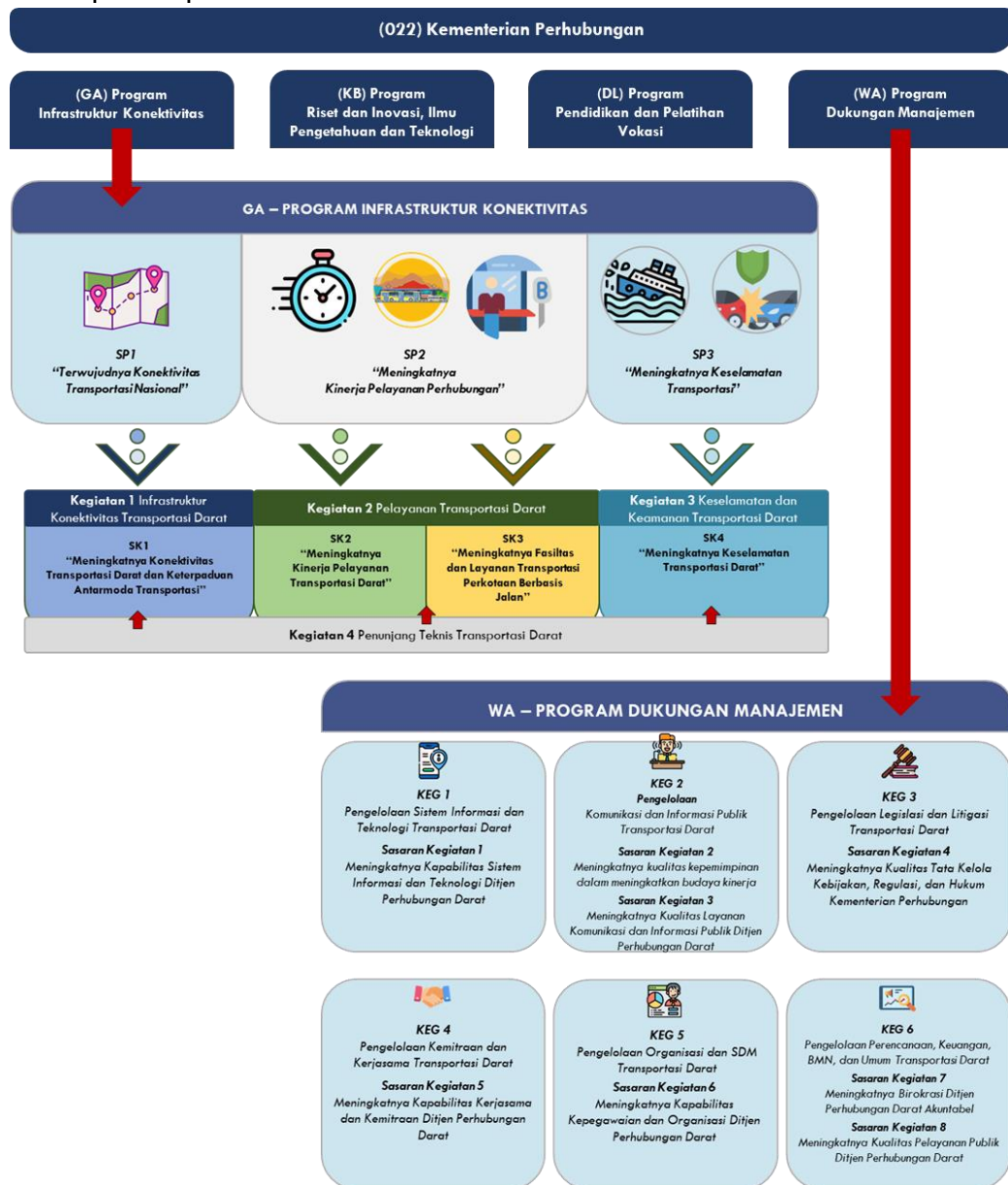
SK.4 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SK.5 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat

SK.6 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat



Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran untuk Tujuan Strategis (TS). Selanjutnya, Sasaran Program (SP) yang terdiri dari SP1, SP2, dan SP3 merupakan sasaran untuk Tujuan Program (TP), dalam hal ini adalah Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat. Adapun SK (Sasaran Kegiatan) merupakan sasaran untuk Tujuan Kegiatan (TK) yang terdiri dari SK1.1, SK.1.3, SK2.4, SK3.4, SK4.1, SK.4.2, SK.4.4, SK5.1, SK.5.2, SK.5.4, dan SK6 yang masing-masing mewakili sasaran untuk setiap kegiatan yang terlingkupi dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4 Startegy Map Program-Kegiatan Ditjen Perhubungan Darat



BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:





Gambar 3.1 9 (Sembilan) Major Project Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.



Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Penguatan jaringan transportasi eksisting; • Perluasan jaringan layanan transportasi; • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; • Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi; • Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal.	Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui: • Optimalisasi simpul transportasi eksisting; • Pembangunan simpul transportasi baru; • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; • Reaktivasi jalur moda transportasi; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; • Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; • Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Penggunaan <i>Traffic Demand Management</i> di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan <i>Traffic Demand Management</i> • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	• Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi.	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara: • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi;



SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada; • Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan; • Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT; • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi; • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan; Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi; • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP; • Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya; • Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur



SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan; - Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; - Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; - Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan. Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB - Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	- Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; - Penegakan hukum; - Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; - Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; - Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; - Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; - Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; - Edukasi keselamatan transportasi.	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: - Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; - Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; - Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; - Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording; - Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi; Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: - Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan; - Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum. Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: - Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi; - Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; - Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi; - Penyediaan fasilitas <i>baggage x-ray checking</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi;



SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi. Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api; • Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda); • Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi <i>security awareness</i> kepada masyarakat (untuk semua moda); • Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda; • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda; • Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Program dan 11 Sasaran Kegiatan.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Sasaran program di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Secara umum terdapat 5 (lima) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, yakni (1) konektivitas, (2) integrasi moda, (3) kinerja pelayanan transportasi, (4) transportasi perkotaan, dan (5) keselamatan transportasi.

Adapun arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.



Tabel 3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	• Penguatan efektivitas jaringan perintis dan subsidi; • Revitalisasi dan optimalisasi pelayanan AKAP dan Angkutan SDP; • Pengendalian sistem angkutan barang.
Integrasi Moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	• Peningkatan penyediaan fasilitas keterpaduan antarmoda pada simpul utama; • Pengembangan jaringan pelayanan pemaduan moda; • Pengembangan transportasi multimoda angkutan barang.
Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi	• Peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat; • Peningkatan kinerja SDM transportasi darat.
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	• Peningkatan penyediaan kinerja pelayanan, dan peran moda angkutan umum massal perkotaan; • Peningkatan efektivitas penerapan skema manajemen lalu lintas pada jalan perkotaan; • Peningkatan integrasi transportasi dan tata ruang; • Peningkatan penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> di perkotaan.
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana; • Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.



Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2.** secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

- AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat**
- AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**
- AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat**
- AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional**
- AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan**
- AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ**
- AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP**

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi nasional. Selanjutnya, AK.3, AK.4 dan AK.5 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan. Adapun, AK.6 dan AK.7 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Program 3, yaitu meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3.**



Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)	• Revitalisasi/optimalisasi terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP eksisting pada jalur utama nasional (PKN, PKW, PKSN) dan pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); • Pembangunan dan rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan proiritas nasional; • Penguatan jaringan AKAP dan TSDP pendukung konektivitas kawasan prioritas (termasuk subsidi angkutan bus/TSDP penghubung KSPN); • Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan dan penunjuk arah).
		Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	• Revitalisasi/optimalisasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK); • Pembangunan kapal penyeberangan dan bus air; • Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.
		Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	• Optimalisasi MRL untuk <i>debottlenecking</i> jaringan jalan; • Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; • Optimalisasi/pembangunan/rehabilitasi terminal penumpang, terminal barang, dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan sistem transportasi darat pada jalur utama logistik nasional	• Pengembangan terminal barang dan pelabuhan SDP pada jalur logistik utama; • Pelaksanaan subsidi Ro-Ro <i>Long Distance Ferry</i>.
		Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	• Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi;

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	- Penguatan jaringan layanan moda bus dan SDP eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan Antarmoda); - Pengembangan dukungan untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar simpul transportasi (pendukung aerotropolis, port estate industry area).
			- Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum; - Pengembangan sistem database MRLL jalan; - Penguatan sistem informasi manajemen transportasi darat (termasuk SIMLALIN); - Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang Online); - Penerapan e-tilang; - Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-BLUE
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	- Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; - Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan; - Kajian dan penerapan ITS; - Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis on-line (integrasi jadwal, ticketing, dan pembayaran); - Pengaturan sarana transportasi darat berteknologi baru (mobil listrik dan lain sebagainya).
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	- Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; - Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	- Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; - Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); - Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya fasilitas dan layanan transportasi perkotaan berbasis jalan	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan	• Penyelenggaraan subsidi angkutan massal perkotaan (melalui skema <i>buy the service</i>); • Pembinaan dan Penyusunan Masterplan Transportasi Perkotaan (Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan) dengan Pemerintah Daerah; • Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan; • Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan di kota-kota besar dan metropolitan (termasuk ibukota baru) melalui pembangunan <i>integrated land transport system</i> (ILTS) yang terdiri dari: a) Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan; b) Pembangunan fasilitas integrasi antarmoda di kawasan perkotaan.
		Perencanaan dan pengembangan transportasi darat untuk Ibu Kota Negara (IKN)	• Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan di kawasan IKN; • Optimalisasi, pembangunan, rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke ibukota baru (selama proses konstruksi maupun operasional IKN); • Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana keselamatan transportasi jalan dan TSDP pendukung IKN; • Penataan jaringan pelayanan transportasi darat pendukung IKN; • Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi perkotaan IKN.
		Penguatan sistem penyelenggaraan transportasi perkotaan	• Pembinaan dan pendampingan perencanaan angkutan perkotaan (termasuk Technical Assistance melalui Program SUTRINAMA-INDOBUS (hibah); • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi; • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan.

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	• Pelaksanaan MRLL pada jaringan jalan nasional; • Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; • Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB); • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
		Penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ	• Penerapan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK); • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; • Penyediaan fasilitas keselamatan jalan; • Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS); • Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
	Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	• Peningkatan kelaikan kapal SDP; • Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP; • Peningkatan pengawasan operasional SDP (ramp check).
		Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	• Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional; • Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau; • Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama); • Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP) atau sistem pengawasan lalu lintas kapal SDP.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 *Major Project*/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 *Major Project* merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mencakup bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain dari pada itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.



3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat

Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah:

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupsi yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di



Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).

5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.
8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusaha serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.



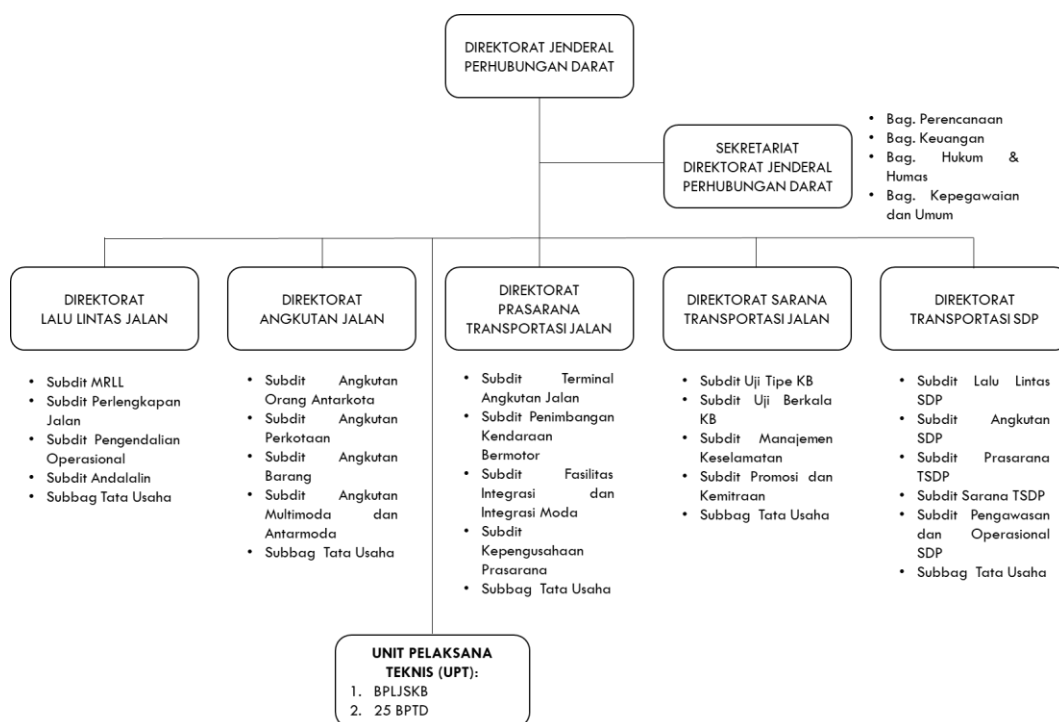
Tabel 3.4 Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT					
1	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (<i>online</i>); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kementerian Perhubungan	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
3	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)		Kementerian Perhubungan	a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020

3.5 Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024

3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Direktur Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II di kantor pusat, serta 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. 6 (enam) Unit Kerja Eselon II terdiri dari 1 (satu) Unit Kerja Sekretariat dan 5 (lima) Unit Kerja Teknis. Sedangkan, 26 Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, dan 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)

3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* (lihat **gambar 1.2**).

a. Penataan dan Peningkatan Status Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

Sejalan dengan impian mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan ditopang dengan mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia (Wior/d Class Government), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan guna mewujudkan pemerintahan



yang gesit (agi/egovernment) melalui penataan kelembagaan, dimana hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan khususnya terkait proses perizinan dan pelayanan masyarakat diberbagai bidang. Dengan dialihkan/ disetarakannya jabatan Eselon 111 dan Eselon IV, maka fungsi dan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat strategis dan perlu diperkuat guna meningkatkan efektifitas, kinerja dan layanan dalam penyelenggaraan transportasi darat

Dalam upaya meningkatkan peran transportasi sebagai urat nadi perekonomian dan menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah dibentuk 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Maksud dibentuknya BPTD adalah untuk meningkatkan kesinambungan dan kualitas penyelenggaraan transportasi darat serta tata kelola hasil pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat di daerah, dimana konektifitas dan aksesibilitas yang handal dan terjangkau menjadi harapan yang selalu up to date seiring tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja dan layanan.

Kondisi saat ini, dengan kelembagaan BPTD yang ada harapan akan peningkatan kinerja dan layanan di bidang perhubungan darat belum sepenuhnya dapat direspon dengan cepat dan diwujudkan. Kondisi tersebut terjadi mengingat cakupan wilayah kerja BPTD yang luas tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan perhubungan darat ekuivalen dengan jumlah Kabupaten/Kota, panjang jalan Nasional, Terminal Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) yang menjadi kewenangannya, tingkat koordinasi yang tidak setara dengan pemangku kepentingan lain di daerah, variasi beban kerja antar BPTD, serta beralihnya fungsi keselamatan pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Untuk meningkatkan efektifitas, kinerja dan layanan di bidang perhubungan darat, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu dengan menyesuaikan jumlah BPTD sesuai cakupan wilayah administratif Provinsi dimana sebagiannya ditingkatkan status eselonernanva dengan 11 (sebelas) Balai setingkat eselon II.a dan 22 (dua puluh dua) Balai setingkat eselon III.a sebagaimana dirinci pada **tabel 3.5**.

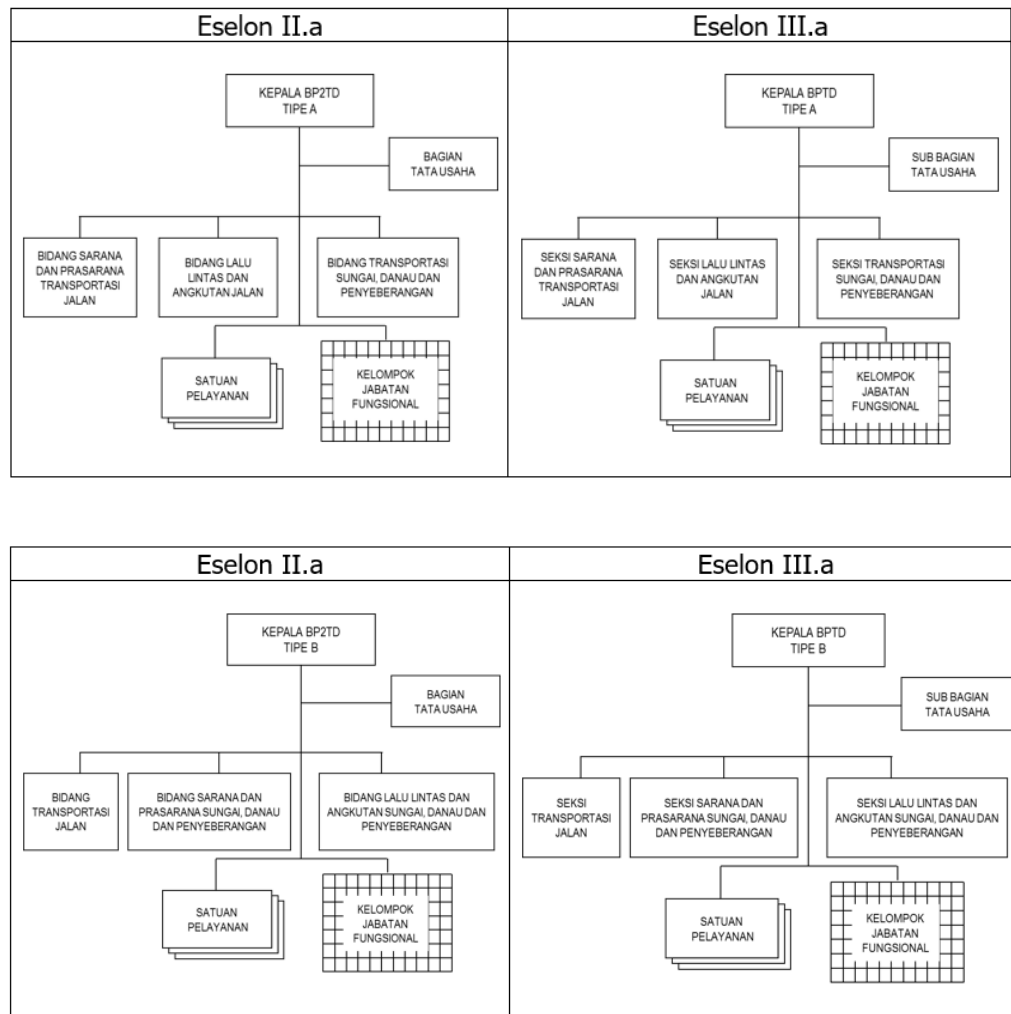


Tabel 3.5 Daftar BP2TD dan BPTD

NO	UNIT	PROVINSI	TIPE
1.	B2PTD WILAYAH II	PROVINSI SUMATERA UTARA	A
2.	B2PTD WILAYAH VIII	PROVINSI LAMPUNG	A
3.	B2PTD WILAYAH IX	PROVINSI SUMATERA SELATAN	A
4.	B2PTD WILAYAH XI	PROVINSI BANTEN	A
5.	B2PTD WILAYAH XII	PROVINSI JAWA BARAT	A
6.	B2PTD WILAYAH XIII	PROVINSI JAWA TENGAH	A
7.	B2PTD WILAYAH XV	PROVINSI JAWA TIMUR	A
8.	B2PTD WILAYAH XVI	PROVINSI BALI	A
9.	B2PTD WILAYAH XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN	A
10.	B2PTD WILAYAH XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	A
11.	B2PTD WILAYAH XXX	PROVINSI MALUKU	B

NO	UNIT	PROVINSI	TIPE
1.	BPTD WILAYAH I	PROVINSI ACEH	A
2.	BPTD WILAYAH III	PROVINSI SUMATERA BARAT	A
3.	BPTD WILAYAH IV	PROVINSI RIAU	A
4.	BPTD WILAYAH V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	B
5.	BPTD WILAYAH VI	PROVINSI JAMBI	A
6.	BPTD WILAYAH VII	PROVINSI BENGKULU	A
7.	BPTD WILAYAH X	PROVINSI BANGKA BELITUNG	A
8.	BPTD WILAYAH XIV	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	A
9.	BPTD WILAYAH XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	A
10.	BPTD WILAYAH XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	B
11.	BPTD WILAYAH XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	A
12.	BPTD WILAYAH XX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	A
13.	BPTD WILAYAH XXI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	A
14.	BPTD WILAYAH XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	A
15.	BPTD WILAYAH XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	A
16.	BPTD WILAYAH XXVI	PROVINSI SULAWESI BARAT	A
17.	BPTD WILAYAH XXVII	PROVINSI SULAWESI TENGAH	A
18.	BPTD WILAYAH XXVIII	PROVINSI GORONTALO	A
19.	BPTD WILAYAH XXIX	PROVINSI SULAWESI UTARA	B
20.	BPTD WILAYAH XXXI	PROVINSI MALUKU UTARA	B
21.	BPTD WILAYAH XXXII	PROVINSI PAPUA	A
22.	BPTD WILAYAH XXXIII	PROVINSI PAPUA BARAT	A





Gambar 3.5 Struktur Organisasi BP2TD dan BPTD

Ke depan, mengingat substansi penyelenggaraan transportasi darat terdiri dari transportasi jalan dan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, maka untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat agar fokus kedua substansi tersebut secara kelembagaan UPT dapat dipisah guna memenuhi harapan masyarakat akan kinerja dan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, memberikan nilai tambah, handal dan terjangkau.

b. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba

Maksud dari pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba adalah dengan penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Parawisata Danau Toba sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba serta Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 10 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Kapal Penumpang, perlu dilakukan pembentukan kelembagaan yang spesifik di kawasan Danau Toba yang memiliki tugas dan fungsi



penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan Danau dan Penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan danau dan Penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan Danau dan Penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Selain itu terdapat Surat Bupati Samosir kepada Menteri Perhubungan Nomor: 550/3231/Dishub/VII/2018, Tanggal 31 Juli 2018, Perihal: Penataan/ Perbaikan Transportasi di Danau Toba, diantaranya penataan/ perbaikan berupa: Kantor Syahbandar di Kabupaten Samosir, Kantor UPT Kementerian Perhubungan di Kabupaten Samosir.

Pengaturan tentang pelayaran (termasuk angkutan di perairan daratan/*inland waterways*) sesuai UU No. 17 Tahun 2008 yang menyangkut bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pada pelaksanaannya pelayaran di sungai dan danau, dan juga penyeberangan, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan, tidak banyak disentuh baik oleh Ditjen Perhubungan Laut maupun Ditjen Perhubungan Darat.

Dengan dikeluarkannya PM No. 122 Tahun 2018 tentang OTK Kementerian Perhubungan, maka secara jelas bahwa penyelenggaraan transportasi SDP, termasuk aspek angkutan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

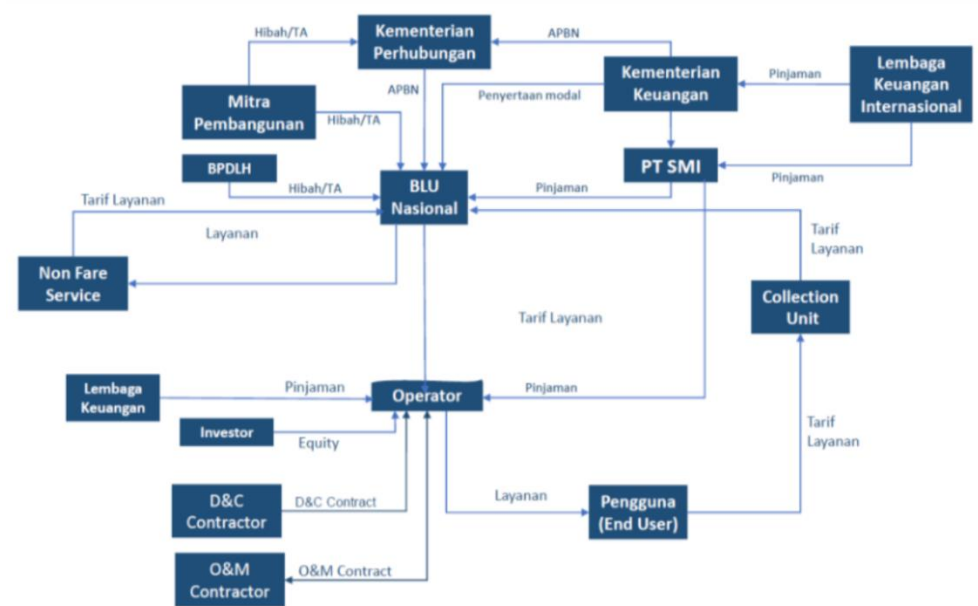
Sampai dengan sekarang, belum ada kelembagaan yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan (atau yang sering dikenal sebagai syahbandar) untuk transportasi SDP (khususnya untuk sungai dan danau), kecuali dibentuknya beberapa otoritas pelabuhan penyeberangan di beberapa lokasi (Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah) berdasarkan PM No. 85 Tahun 2011 tentang OTK Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Ke depan, untuk transportasi SDP perlu dibentuk UPT seperti di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengatur teknis operasional seluruh bidang pelayaran, dengan nomenklatur KSOP-TSDP (Kantor Syahbandar dan Operator Pelabuhan-Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KSOP-TSDP tidak harus diadakan di setiap pelabuhan, dapat menganut konsep wilayah kerja (*wilker*) untuk setiap Provinsi atau beberapa Provinsi, dengan kedudukan/lokasi KSOP-TSDP di pelabuhan SDP yang besar (volume lalu lintas kapal SDP yang besar).



c. Pembentukan Badan Layanan Umum Nasional sebagai Pengelola Subsidi (Buy The Service) serta pengembangan Transportasi Perkotaan

- Dalam melaksanakan pengelolaan subsidi transportasi perkotaan serta pengembangan layanan, diperlukan suatu badan taktis yang bertindak sebagai perpanjangan Pemerintah (tingkatan stratejik) dalam mengelola layanan. Contoh PT. Transjakarta sebagai pengelola layanan transportasi perkotaan (sebelumnya berbentuk UPTD);
- Dalam menjalankan Program Buy the Service di tahun 2020, Ditjen Perhubungan Darat berkontrak dengan pihak ke-3 (Manajemen Pengelola) untuk menjadi perpanjangan tangan dalam mengelolalayanan (operasional, mon/taring dan evaluasi), namun Manajemen Pengelola memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Sebagai contoh PT. Transjakarta dapat bekerjasama dengan pihak ke-3 untuk memanfaatkan bus sebagai media iklan, pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk pengembangan layanan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan oleh PT. Transjakarta memungkinkan beban subsidi layanan transportasi perkotaan dapat berkurang atau layanan dapat makin berkembang karena sumber pendapatan/pengurang subsidi bukan hanya dari tiket penumpang (Pare Box) namun juga sumber pendapatan lain (ron fare box);
- Dengan demikian diperlukan suatu Badan Layanan Umum Nasional yang bisa menjalankann peran pengelolaan subsidi angkutan perkotaan serta pengembangan [ayanan. Badan Layanan Umum Nasional memungkinkan pendanaan bukan hanya dari APBN dan pengelolaan yang lebih profesional;
- Pemerintah Pusat dapat menjalankan peran pembinaan serta bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam menyiapkan Rencana Mobilitas Perkotaan serta kelembagaan transportasi perkotaan.



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Transportasi Perkotaan



BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Program Infrastruktur Konektivitas Darat Tahun 2020-2024

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Program

Target kinerja Program Penyelenggaraan Transportasi Darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari setiap Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana disampaikan pada subbab 2.3.2. Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama periode 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program Infrastruktur Konektivitas

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	-	0,930
		IKP2	Rasio konektivitas transportasi perkotaan	Rasio	-	1,000
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat	Indeks	-	80
		IKP4	On Time Performance (OTP) angkutan penyeberangan	%	82,9	83,4
		IKP5	On Time Performance (OTP) angkutan perkotaan	%	-	70,0
SP3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IKP1	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan	Rasio (accident/ 10.000 keberangkatan)	-	0,011
		IKP2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan	Rasio (accident/ 10.000 pelayaran)	-	0,083

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2020-2024. Bahkan melalui e-performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.



Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) atau proyek prioritas dari pelaksanaan program infrastruktur konektivitas di setiap kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Secara umum target keluaran yang ditargetkan dari setiap kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program infrastruktur konektivitas sub sektor transportasi darat selama periode 2020-2024.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Target Proyek Strategis/Keluaran (Output) RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	TOTAL
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	
01	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	340
02	Pelayanan Angkutan Pemandu Moda/Antarmoda Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Wisata Nasional Lainnya, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api	25
03	Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan	61
04	Pembangunan Arterial Transport Managemnt System (AtMS)	52
05	Pemberian Bus Bantuan	1630
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	17
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	36
08	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	335
09	Pelayanan Long Distance Ferry Jakarta - Surabaya (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	1
10	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis	32
11	Pembangunan Bus Air	26
12	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	53
13	Pembangunan Pelabuhan Sungai	33
14	Pembangunan Pelabuhan Danau	16
15	Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (Buy The Service)	21
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	
01	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	63
02	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	55
03	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	44
04	Rehabilitasi Pelabuhan Danau	10
05	Digitalisasi Terminal	55
06	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ILTS	34



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	TOTAL
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	
01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	33
02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	33
03	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	62
04	Penanganan Perlintasan Sebidang	29
05	Rehabilitasi UPPKB	80
06	Pembangunan UPPKB	34
07	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	47
08	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	12
09	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	107
10	Pembangunan Taman Edukasi	6
11	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan	34
12	Pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	1
13	Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik	6408694
14	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25
15	Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	24
16	Pembangunan Halte Sungai	28
17	Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP	5
18	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau	29
19	Pengerukan Alur Pelayaran SDP	13
20	Pemberian Bantuan Peralatan Pelayaran SDP	25
21	Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose	15
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	
01	Pembentukan Road Safety Center (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	20

Sumber: Hasil Analisis (2020)

4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program penyelenggaraan transportasi darat untuk periode pembangunan 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.3**.

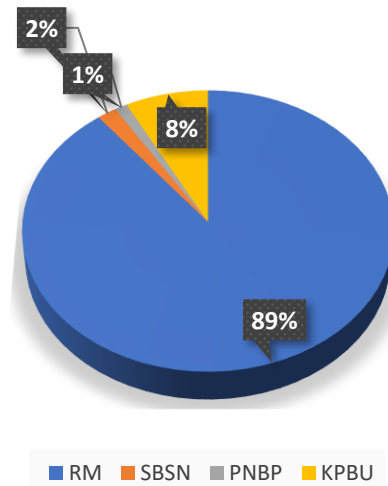
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	APBN (Rp Miliar)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	3.774,56	7.932,19	8.080,42	8.439,06	8.584,88	36.811,11
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.320,68	4.045,57	4.020,38	4.293,02	4.966,42	19.646,07
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	577,86	1.563,10	1.485,03	1.248,00	917,30	5.791,30
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	871,09	2.318,60	2.570,09	2.893,12	2.695,84	11.348,74
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00



4.2.2 Skema Pendanaan

Adapun skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada semua kegiatan tersebut pada Tabel 4.3 diatas disampaikan pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1 Skema Pendanaan Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-2024

Pada intinya, sumber pendanaan dari APBN (Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara) akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, diantaranya: (1) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengoperasian terminal jalan, (2) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengoperasian pelabuhan SDP, (3) penyelenggaraan pelayanan angkutan bus perintis, *Buy The Service* BRT, PSO angkutan barang, (4) penyelenggaraan lintas pelayanan TSDP perintis/PSO, (5) penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, termasuk ATCS) dalam rangka MRL (ZoSS, RASS, pembatasan kecepatan), (6) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengoperasian UPPKB.

Sumber pendanaan alternatif, dari KPBU dan KSO/KSP akan dioptimalkan untuk pembangunan dan pengembangan pelayanan transportasi darat yang sifatnya komersil, diantaranya: (1) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan, (2) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di 73 lokasi, (3) Pengembangan terminal bus tipe A di 20 lokasi, dan (4) Balai pengujian laik jalan & sertifikasi kendaraan bermotor (BPLJSKB) 1 lokasi, dan (5) Dermaga Penyeberangan 3 lokasi.



5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era-era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dlsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan, yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Diharapkan setiap Unit Kerja dapat menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Untuk implementasi Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana



Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 ini setidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



LAMPIRAN I

*“Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan
Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2020-2024”*

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN
SUB SEKTOR TRANSPORTASI DARAT

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
03	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat											
GA	Program Infrastruktur Konektivitas							3.774,6	7.932,2	8.080,4	8.439,1	8.584,9
SP 01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional												
IKP 01 Rasio Konektivitas Transportasi Darat		rasio	0,64	0,71	0,79	0,86	0,93					
IKP 05 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan		rasio	0,273	0,455	0,591	0,727	1,000					
SP 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan												
IKP 01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat		nilai	80	83	85	88,4	88,5					
IKP 06 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP		%	83,0	83,1	83,2	83,3	83,4					
IKP 07 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan		%	50	55	60	65	70					
SP 03 Meningkatnya Keselamatan Transportasi												
IKP 01 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan		rasio	0,020	0,019	0,016	0,014	0,011					
IKP 02 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran		rasio	0,088	0,086	0,085	0,084	0,083					
4367 Kegiatan Infrastruktur Transportasi Darat							2.320,7	4.045,6	4.020,4	4.293,0	4.966,4	
SK 01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi												
IKK 01 Jumlah (lintasan) trayek pelayanan angkutan jalan nasional		trayek	2800	2805	2810	2815	2820					
IKK 02 Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap baseline 2019		%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43					
IKK 03 Persentase pelaksanaan subsidi angkutan barang untuk mendukung tol laut		%	21,3	37,7	65,6	82,0	100,0					
IKK 04 Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau		menit/100km	0	240	200	171	150					
IKK 05 Tingkat pemanfaatan pemberian bantuan bus sekolah		%	75	100	100	100	100					
IKK 06 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi		lokasi	104	104	111	111	114					
IKK 07 Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda		lokasi	4	9	15	20	25					
IKK 08 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan		lintas	301	367	382	392	402					
IKK 09 Jumlah kapal SDP perintis yang beroperasi		unit	74	78	83	89	94					
IKK 10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi		lokasi	722	734	747	769	782					
IKK 11 Panjang trayek layanan subsidi pengembangan transportasi perkotaan skema buy the service		km	639,5	800	1000	1200	1400					
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat							577,9	1.563,1	1.485,0	1.248,0	917,3	
SK 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat												
IKK 01 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A		nilai	53,57	53,60	53,65	54,70	53,75					
IKK 02 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A		%	70,35	73,70	77,05	80,40	83,75					
IKK 03 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP		%	71	72	74	78	79					
IKK 04 Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan		menit	144	138	135	130	130					
SK 03 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan												
IKK 05 Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan		%	30	40	50	60	70					
4369 Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat							871,1	2.318,6	2.570,1	2.893,1	2.695,8	
SK 04 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat												
IKK 01 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		%	3,0	9,0	16,0	22,0	29,0					
IKK 02 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		%	50,0	35,0	30,0	25,0	20,0					
IKK 03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)		dokumen	40	60	80	100	120					
IKK 04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional		lokasi	59	91	125	156	189					

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp Miliar)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 05 Jumlah ketersediaan taman edukatif	lokasi	2	4	5	7	8					
IKK 06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	16.000	39.000	39.000	39.000	39.000					
IKK 07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	unit	3	6	10	14	17					
IKK 08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	48	52	56	59	63					
IKK 09 Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan	lokasi	13	18	22	26	29					
IKK 10 Jumlah lintas pelayaran SDP yang terlayani pengawasan kapal patroli <i>multipurpose</i>	lintas	3	6	9	13	17					
4370 Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat											
SK 05 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat											
IKK 01 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85	86	87	88	89					
WA Program Dukungan Manajemen							3.774,6	7.932,2	8.080,4	8.439,1	8.584,9
SP 01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum											
IKP 01 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat <i>class action</i> oleh masyarakat dibai	%	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0					
SP 02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	nilai	78,0	79,0	79,5	80,0	80,5					
IKP 01 Indeks RB Kementerian Perhubungan											
4596 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat											
SK 01 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat											
a IKK 01 Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	nilai	3,80	3,90	3,95	3,96	4,03					
4598 Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Darat											
SK 02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum											
IKK 01 Indeks Reformasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat	nilai	72	73	74	75	76					
IKK 02 Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	75	76	77	78	79					
4631 Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat											
SK 03 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat											
IKK 01 Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	78	78,5	79	79,5	80					
IKK 02 Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat	nilai	71	72	74	74	75					
IKK 03 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat	nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1					
4632 Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Umum Transportasi Darat											
SK 04 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel											
IKK 01 Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat	nilai	81,8	81,9	82	82,1	82,2					
IKK 02 Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	91,5	91,7	91,9	92	92,3					
IKK 03 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat	nilai	3	3,05	3,1	3,15	3,2					
IKK 04 Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	78	80	82	84	85					
IKK 05 Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80,2	84,2	86,2	88,2	90,2					
IKK 06 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	nilai	75	76	77	78	80					
IKK 07 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	70	71	72	73	74					
4633 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat											
SK 05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat											
IKK 01 Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat	nilai	0	24	28	74	100					
IKK 02 Reputasi Positif Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	nilai	70	73	76	80	85					
4635 Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Darat											
SK 06 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat											
IKK 01 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan KemitraanTransportasi Darat	nilai	80	82	85	86	87					

LAMPIRAN II

*“Matriks Proyek Strategis Sub Sektor Transportasi Darat
Tahun 2020-2024”*

MATRIKS PROYEK PRIORITAS
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
GA	Program Infrastruktur Konektivitas									3.789,56	7.984,09	8.108,27	8.439,06	8.584,88	36.905,85	Ditjen Hubdat
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat									2.335,68	4.097,47	4.048,22	4.293,02	4.966,42	19.740,81	Ditjen Hubdat
01	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Layanan	322	325	330	336	340	340	135,00	160,00	200,00	220,00	250,00	965,00	Dit.AJ
02	Pelayanan Angkutan Pemadu Moda/Antarmoda Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Wisata Nasional Lainnya, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api	Tersebar	Layanan	12	20	20	20	25	25	64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	315,00	Dit.AJ
03	Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan	Tersebar	Layanan	13	23	40	50	61	61	20,00	49,98	65,03	80,27	102,02	317,30	Dit.AJ
04	Pembangunan Arterial Transport Managemnt System (AtMS)	Tersebar	Lokasi	0	12	11	15	14	52	-	600,00	550,00	750,00	700,00	2.600,00	Dit.LLJ
	1 AtMS di Pansela	Tersebar	Unit	0	12	11	0	0		-	600,00	550,00	-	-	1.150,00	Dit.LLJ
	2 AtMS di Pantura	Tersebar	Unit	0	0	0	15	14		-	-	-	750,00	700,00	1.450,00	Dit.LLJ
05	Pemberian Bus Bantuan	Tersebar	Unit	280	290	300	360	400	1630	140,00	174,00	180,00	250,95	280,00	1.024,95	Dit.AJ
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Tersebar	Lokasi	11	9	3	1	3	17	176,70	386,20	159,00	60,00	140,00	921,90	Dit.PTJ
	1 Pembangunan Terminal Tipe-A Anak Air	Sumbang	Unit	1	0	0	0	0		41,20	-	-	-	-	41,20	Dit.PTJ
	2 Pembangunan Terminal Tipe-A Demak	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		5,00	-	-	-	-	5,00	Dit.PTJ
	3 Pembangunan Terminal Motasin (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	60,80	-	-	-	70,80	Dit.PTJ
	4 Pembangunan Terminal Motamasin (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	45,80	-	-	-	55,80	Dit.PTJ
	5 Pembangunan Terminal Wini (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	20,40	-	-	-	30,40	Dit.PTJ
	6 Pembangunan Terminal Aruk (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	1	1	0	0	0		18,00	65,00	-	-	-	83,00	Dit.PTJ
	7 Pembangunan Terminal Skouw (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	1	1	0	0	0		10,00	50,00	-	-	-	60,00	Dit.PTJ
	8 Pembangunan Terminal Tipe-A Kupang	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	39,00	-	-	-	49,00	Dit.PTJ
	9 Pembangunan Terminal Tipe-A Palopo	Sulsel	Unit	1	1	0	0	0		10,00	33,20	-	-	-	43,20	Dit.PTJ
	10 Pembangunan Terminal Tipe-A Boolang Mongondow	Sulut	Unit	1	1	0	0	0		5,50	46,00	-	-	-	51,50	Dit.PTJ
	11 Pembangunan Terminal Nanga Badau (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	1	1	1	0	0		47,00	26,00	39,00	-	-	112,00	Dit.PTJ
	12 Pembangunan Terminal Tipe-A Sei Kelik	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	60,00	-	-	60,00	Dit.PTJ
	13 Pembangunan Terminal Tipe-A Lamandau	Kalteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	60,00	-	-	60,00	Dit.PTJ
	14 Pembangunan Terminal Tipe-A Tanjung Selor	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	60,00	-	60,00	Dit.PTJ
	15 Pembangunan Terminal Jagobabang (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.PTJ
	16 Pembangunan Terminal Temajuk (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.PTJ
	17 Pembangunan Terminal Toraja Utara	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	40,00	40,00	Dit.PTJ
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Tersebar	Lokasi	3	8	5	10	10	36	20,06	60,00	49,20	80,00	80,00	289,26	Dit.PTJ
	1 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba	Sumut	Unit	1	1	0	0	0		6,69	7,50	-	-	-	14,19	Dit.PTJ
	2 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo	NTT	Unit	1	1	0	0	0		6,69	7,50	-	-	-	14,19	Dit.PTJ
	3 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur (Gn Kidul,dieng,merapi,pacitan,pantai selatan)	Jateng	Unit	1	2	0	1	5		6,69	15,00	-	8,00	40,00	69,69	Dit.PTJ
	4 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bromo Tengger Semeru	Jatim	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	5 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Wakatobi	Sultra	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	6 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Morotai	Malut	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	7 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Likupang (bunaken-lembeh,tomohon)	Sulut	Unit	0	1	1	2	1		-	7,50	9,84	16,00	8,00	41,34	Dit.PTJ
	8 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Terminal Terpadu Merak	Banten	Unit	0	0	1	0	0		-	-	9,84	-	-	9,84	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	9	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bukittinggi (Singkarak)	Sumbar	Unit	0	0	0	2	0		-	-	-	16,00	-	16,00	Dit.PTJ
	10	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Stasiun KA Cepat JKT-BDG (Bandung)	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ
	11	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Pelabuhan Ketapang-TAJ Banyuwangi	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ
	12	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung	Banten	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ
	13	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Pangandaran	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ
	14	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Toraja	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ
	15	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Kota Bandung (Tangkuban Perahu)	Jabar	Unit	0	0	0	0	2		-	-	-	-	16,00	16,00	Dit.PTJ
	16	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lagoi Bintan	Kepri	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	8,00	8,00	Dit.PTJ
	17	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Stasiun-Terminal Klaten	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	8,00	8,00	Dit.PTJ
08	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)		Tersebar	Layanan	234	300	315	325	335	335	512,02	587,33	618,05	652,21	683,88	3.053,50	Dit.TSDP
09	Pelayanan Long Distance Ferry Jakarta - Surabaya (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)		Tersebar	Layanan	1	1	1	1	1	1	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	80,00	Dit.TSDP
10	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis		Tersebar	Unit	5	14	14	12	12	32	67,40	311,60	285,18	290,59	403,26	1.358,02	Dit.TSDP
	1	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	1	1	0	0	0		10,80	19,20	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	2	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-Matak-Penagi (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri	Unit	1	1	0	0	0		25,00	71,50	-	-	-	96,50	Dit.TSDP
	3	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri Menanti-Krg Baru (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumsel	Unit	1	1	0	0	0		10,00	20,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	4	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		10,80	30,70	-	-	-	41,50	Dit.TSDP
	5	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		10,80	30,70	-	-	-	41,50	Dit.TSDP
	6	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	1	0	0	0		-	11,50	-	-	-	11,50	Dit.TSDP
	7	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk. Dalam-Tk Bungus (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumut-Sumbar	Unit	0	1	1	0	0		-	15,00	15,00	-	-	30,00	Dit.TSDP
	8	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumut	Unit	0	1	1	0	0		-	15,00	15,00	-	-	30,00	Dit.TSDP
	9	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-Sunyat (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri	Unit	0	1	1	0	0		-	15,00	15,00	-	-	30,00	Dit.TSDP
	10	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-Kewapante (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	0	1	1	0	0		-	14,00	21,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
	11	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Lamerang (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku	Unit	0	1	1	0	0		-	15,00	17,50	-	-	32,50	Dit.TSDP
	12	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku	Unit	0	1	1	0	0		-	18,00	37,00	-	-	55,00	Dit.TSDP
	13	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-Gebe (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Malut	Unit	0	1	1	0	0		-	18,00	37,00	-	-	55,00	Dit.TSDP
	14	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Cadangan Perintis Provinsi Sulteng	Sulteng	Unit	0	1	1	0	0		-	18,00	29,50	-	-	47,50	Dit.TSDP
	15	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumbar	Unit	0	0	1	1	0		-	-	18,30	27,35	-	45,65	Dit.TSDP
	16	Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Unit	0	0	1	1	0		-	-	18,30	27,35	-	45,65	Dit.TSDP
	17	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-Kangean (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Jatim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	18,30	27,35	-	45,65	Dit.TSDP
	18	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-Moti (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Malut	Unit	0	0	1	1	0		-	-	15,00	15,00	-	30,00	Dit.TSDP
	19	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tanjung Ru-Tanjung Nyato	Babel	Unit	0	0	1	1	0		-	-	14,14	21,21	-	35,35	Dit.TSDP
	20	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Dowara	Malut	Unit	0	0	1	1	0		-	-	14,14	21,21	-	35,35	Dit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	21 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri-Kalbar	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	42,46	63,69	106,15	Dit.TSDP
	22 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kaltim-Sulsel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	24,20	36,30	60,50	Dit.TSDP
	23 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P. Tanah Jampea (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,09	30,12	50,20	Dit.TSDP
	24 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-Kesui (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,09	30,12	50,20	Dit.TSDP
	25 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sotifi-Makian-Kayoa (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Malut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,09	30,12	50,20	Dit.TSDP
	26 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Benjina-Batu Goyang*	Maluku	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	24,20	36,30	60,50	Dit.TSDP
	27 Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KTI (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
	28 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Babang-P.Mandioli (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Malut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
	29 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-Pomako (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua-Papua Barat	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
	30 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Manokwari-Serui (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua-Papua Barat	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
	31 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahai-Foley-Arar (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku-Papua Barat	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
	32 Pembangunan kapal penyeberangan Leihitu-Iha/Luhu*	Maluku	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	26,62	26,62	Dit.TSDP
11	Pembangunan Bus Air	Tersebar	Unit	4	7	10	8	6	26	36,00	52,50	66,75	55,84	50,52	261,60	Dit.TSDP
	1 Pembangunan Bus Air Sumut 1 (lanjutan)	Sumut	Unit	1	0	0	0	0		3,50	-	-	-	-	3,50	Dit.TSDP
	2 Pembangunan Bus Air Sumut 2 (lanjutan)	Sumut	Unit	1	0	0	0	0		4,50	-	-	-	-	4,50	Dit.TSDP
	3 Pembangunan Bus Air Sentani 1 (lanjutan)	Papua	Unit	1	0	0	0	0		8,00	-	-	-	-	8,00	Dit.TSDP
	4 Pembangunan Bus Air Sentani 2	Papua	Unit	1	0	0	0	0		20,00	-	-	-	-	20,00	Dit.TSDP
	5 Pembangunan Bus Air Bengkulu	Bengkulu	Unit	0	1	0	0	0		-	7,50	-	-	-	7,50	Dit.TSDP
	6 Pembangunan Bus Air Kalteng (Sampit)	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	7,50	-	-	-	7,50	Dit.TSDP
	7 Pembangunan Bus Air Kumai	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	7,50	-	-	-	7,50	Dit.TSDP
	8 Pembangunan Bus Air Kalimantan Timur	Kaltim	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	5,00	-	-	12,50	Dit.TSDP
	9 Pembangunan Bus Air Malut (Morotai)	Malut	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	5,00	-	-	12,50	Dit.TSDP
	10 Pembangunan Bus Air Lampung	Lampung	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	5,00	-	-	12,50	Dit.TSDP
	11 Pembangunan Bus Air Maluku	Maluku	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	5,00	-	-	12,50	Dit.TSDP
	12 Pembangunan Bus Air Kalsel (Banjarmasin)	Kalsel	Unit	0	0	1	0	0		-	-	11,00	-	-	11,00	Dit.TSDP
	13 Pembangunan Bus Air Kalsel (Martapura)	Kalsel	Unit	0	0	1	0	0		-	-	8,25	-	-	8,25	Dit.TSDP
	14 Pembangunan Bus Air Danau Lindu	Sulteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	11,00	-	-	11,00	Dit.TSDP
	15 Pembangunan Bus Air Boolang Mongondow Utara	Sulut	Unit	0	0	1	0	0		-	-	5,50	-	-	5,50	Dit.TSDP
	16 Pembangunan Bus Air Sulawesi Tenggara	Sultra	Unit	0	0	1	1	0		-	-	5,50	8,25	-	13,75	Dit.TSDP
	17 Pembangunan Bus Air Gorontalo	Gorontalo	Unit	0	0	1	1	0		-	-	5,50	8,25	-	13,75	Dit.TSDP
	18 Pembangunan Bus Air Sumsel (Musi Banyuasin)	Sumsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	9,08	-	9,08	Dit.TSDP
	19 Pembangunan Bus Air Bangka Belitung	Babel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	6,05	-	6,05	Dit.TSDP
	20 Pembangunan Bus Air Jambi (Tg Jabung Timur)	Jambi	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	6,05	-	6,05	Dit.TSDP
	21 Pembangunan Bus Air Malut (Ternate)	Malut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	6,05	9,08	15,13	Dit.TSDP
	22 Pembangunan Bus Air Malut (Tidore)	Malut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	6,05	9,08	15,13	Dit.TSDP
	23 Pembangunan Bus Air Maluku (Seram Bagian Barat)	Maluku	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	6,06	9,08	15,14	Dit.TSDP
	24 Pembangunan Bus Air Danau Batur	Bali	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	6,66	6,66	Dit.TSDP
	25 Pembangunan Bus Air Kaltara	Kaltara	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	6,66	6,66	Dit.TSDP
	26 Pembangunan Bus Air Jatim (Gresik)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	9,98	9,98	Dit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
12	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Tersebar	Lokasi	19	21	23	24	26	53	485,00	761,96	780,41	641,41	1.005,00	3.673,79	Diit.TSDP
	1 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	NTT	Unit	1	0	0	0	0		12,30	-	-	-	-	12,30	Diit.TSDP
	2 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	NTT	Unit	1	0	0	0	0		35,50	-	-	-	-	35,50	Diit.TSDP
	3 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Boniton	Sulteng	Unit	1	0	0	0	0		4,80	-	-	-	-	4,80	Diit.TSDP
	4 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		19,50	-	-	-	-	19,50	Diit.TSDP
	5 Pembangunan Pelabuhan penyeberangan 1j, Kelayang (1j, Nyato) (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Babel	Unit	1	1	0	0	0		40,30	44,70	-	-	-	85,00	Diit.TSDP
	6 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		29,00	56,00	-	-	-	85,00	Diit.TSDP
	7 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam	Sumut	Unit	1	1	0	0	0		15,00	28,84	-	-	-	43,84	Diit.TSDP
	8 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit	Riau	Unit	1	1	0	0	0		10,80	28,84	-	-	-	39,64	Diit.TSDP
	9 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau	Kepri	Unit	1	1	0	0	0		13,30	28,84	-	-	-	42,14	Diit.TSDP
	10 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat	Maluku	Unit	1	1	0	0	0		14,50	28,84	-	-	-	43,34	Diit.TSDP
	11 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa	Maluku	Unit	1	1	0	0	0		10,00	28,84	-	-	-	38,84	Diit.TSDP
	12 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		30,90	54,10	-	-	-	85,00	Diit.TSDP
	13 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Papua Barat	Unit	1	1	1	0	0		14,10	30,28	43,10	-	-	87,48	Diit.TSDP
	14 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Bali	Unit	1	0	0	0	0		117,50	-	-	-	-	117,50	Diit.TSDP
	15 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Bali	Unit	1	0	0	0	0		98,00	-	-	-	-	98,00	Diit.TSDP
	16 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumut	Unit	1	1	1	0	0		4,50	28,85	51,65	-	-	85,00	Diit.TSDP
	17 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	1	0	0		5,00	46,28	33,73	-	-	85,00	Diit.TSDP
	18 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	1	0	0		5,00	45,97	34,03	-	-	85,00	Diit.TSDP
	19 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku	Unit	1	1	1	0	0		5,00	39,85	40,15	-	-	85,00	Diit.TSDP
	20 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Malut	Unit	0	1	1	0	0		-	45,57	39,43	-	-	85,00	Diit.TSDP
	21 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua Barat	Unit	0	1	1	0	0		-	49,53	35,47	-	-	85,00	Diit.TSDP
	22 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	0	1	1	0	0		-	44,28	40,73	-	-	85,00	Diit.TSDP
	23 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua Barat	Unit	0	1	1	1	0		-	29,29	66,99	12,17	-	108,45	Diit.TSDP
	24 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua Barat	Unit	0	1	1	1	0		-	38,08	60,14	24,24	-	122,46	Diit.TSDP
	25 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulteng	Unit	0	1	1	1	0		-	25,00	30,00	30,00	-	85,00	Diit.TSDP
	26 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Maluku	Unit	0	1	1	1	0		-	25,00	30,00	30,00	-	85,00	Diit.TSDP
	27 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rinca	NTT	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	25,00	25,00	-	65,00	Diit.TSDP
	28 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Diit.TSDP
	29 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Diit.TSDP
	30 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Diit.TSDP
	31 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Diit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	32	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	33	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	34	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kepri	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	35	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	36	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulteng	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	37	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	25,00	30,00	30,00	85,00	Dit.TSDP
	38	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	30,00	30,00	60,00	Dit.TSDP
	39	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabulan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	60,00	85,00	Dit.TSDP
	40	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Riau	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	35,00	60,00	Dit.TSDP
	41	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	35,00	60,00	Dit.TSDP
	42	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	35,00	60,00	Dit.TSDP
	43	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulteng	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	35,00	60,00	Dit.TSDP
	44	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	60,00	85,00	Dit.TSDP
	45	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	25,00	35,00	60,00	Dit.TSDP
	46	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Lepar*	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	25,00	40,00	Dit.TSDP
	47	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Babel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	60,00	60,00	Dit.TSDP
	48	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	60,00	60,00	Dit.TSDP
	49	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	60,00	60,00	Dit.TSDP
	50	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	60,00	60,00	Dit.TSDP
	51	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	85,00	85,00	Dit.TSDP
	52	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru Bakit	Babel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	53	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Belinyu*	Babel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
13	Pembangunan Pelabuhan Sungai		Tersebar	Lokasi	12	18	16	18	14	33	81,70	285,00	240,00	270,00	210,00	1.086,70	Dit.TSDP
	1	Pembangunan Pelabuhan Sungai Kuala Jambi	Jambi	Unit	1	0	0	0	0		7,20	-	-	-	-	7,20	Dit.TSDP
	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai Sri Menanti	Sumsel	Unit	1	1	0	0	0		3,00	15,00	-	-	-	18,00	Dit.TSDP
	3	Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats	Papua	Unit	1	1	0	0	0		10,00	15,00	-	-	-	25,00	Dit.TSDP
	4	Pembangunan Pelabuhan Sungai Akat	Papua	Unit	1	1	0	0	0		6,00	15,00	-	-	-	21,00	Dit.TSDP
	5	Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer	Papua	Unit	1	1	0	0	0		6,00	15,00	-	-	-	21,00	Dit.TSDP
	6	Pembangunan Pelabuhan Sungai Papera	Papua	Unit	1	1	0	0	0		6,00	15,00	-	-	-	21,00	Dit.TSDP
	7	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Sawoerma (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	1	1	0	0	0		6,00	30,00	-	-	-	36,00	Dit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	8	Pembangunan Pelabuhan Sungai Kumai	Kalteng	Unit	1	1	1	0	0		5,00	15,00	15,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
	9	Pembangunan Pelabuhan Sungai Pasar Lima	Kalsel	Unit	1	1	1	0	0		7,50	15,00	15,00	-	-	37,50	Dit.TSDP
	10	Pembangunan Pelabuhan Sungai Mentaya-Basirih	Kalteng	Unit	1	1	1	0	0		5,00	15,00	15,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
	11	Pembangunan Pelabuhan Sungai Sei Ijum	Kalteng	Unit	1	1	1	0	0		5,00	15,00	15,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
	12	Pembangunan Pelabuhan Sungai Mentaya-Bapinang*	Kalteng	Unit	1	1	1	0	0		15,00	15,00	15,00	-	-	45,00	Dit.TSDP
	13	Pembangunan Pelabuhan Sungai Musi 7 Ulu	Sumsel	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	14	Pembangunan Pelabuhan Sungai Delta Upang dan Salek	Sumsel	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	15	Pembangunan Pelabuhan Sungai Sei Gampa	Kalsel	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	16	Pembangunan Pelabuhan Sungai Sampit	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	17	Pembangunan Pelabuhan Sungai Sampit Seberang	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	18	Pembangunan Pelabuhan Sungai Serayu*	Jateng	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	19	Pembangunan Pelabuhan Sungai Pendalaman Baru*	Kalsel	Unit	0	1	1	1	0		-	15,00	15,00	15,00	-	45,00	Dit.TSDP
	20	Pembangunan Pelabuhan Sungai Burmeso	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dit.TSDP
	21	Pembangunan Pelabuhan Sungai Kasonaweja	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dit.TSDP
	22	Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Saleh	Kalbar	Unit	0	0	1	1	1		-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dit.TSDP
	23	Pembangunan Pelabuhan Sungai Teluk Melano*	Kalbar	Unit	0	0	1	1	1		-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dit.TSDP
	24	Pembangunan Pelabuhan Sungai di Kalimantan Timur	Kaltim	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	25	Pembangunan Pelabuhan Sungai Kapuas Hulu	Kalbar	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	26	Pembangunan Pelabuhan Sungai Asahan 1*	Sumut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	27	Pembangunan Pelabuhan Sungai Asahan 2*	Sumut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	28	Pembangunan Pelabuhan Sungai Palingkau*	Kalsel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	29	Pembangunan Pelabuhan Sungai Gunung Tabur*	Kaltim	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	30	Pembangunan Pelabuhan Sungai Benteng Somba Opu*	Sulsel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	31	Pembangunan Pelabuhan Sungai Anjir Sampit	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	32	Pembangunan Pelabuhan Sungai Bapuji	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	33	Pembangunan Pelabuhan Sungai Kapiten	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
14		Pembangunan Pelabuhan Danau	Tersebar	Lokasi	12	12	11	9	5	16	337,80	143,15	172,84	130,00	50,00	833,79	Dit.TSDP
	1	Pembangunan Pelabuhan Danau Waduk Cirata	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		3,00	-	-	-	-	3,00	Dit.TSDP
	2	Pembangunan Pelabuhan Danau Bedugul Tababab	Bali	Unit	1	0	0	0	0		14,50	-	-	-	-	14,50	Dit.TSDP
	3	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sumut	Unit	7	0	0	0	0		295,30	-	-	-	-	295,30	Dit.TSDP
	4	Pembangunan Pelabuhan Danau Sentani-Yabaso	Papua	Unit	1	1	1	0	0		5,00	15,00	15,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
	5	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batur di kuburan	Bali	Unit	1	1	1	0	0		5,00	15,00	15,00	-	-	35,00	Dit.TSDP
+	6	Pembangunan Pelabuhan Danau Batur di Kedisan	Bali	Unit	1	1	0	0	0		15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
+	7	Pembangunan Pelabuhan Danau Batur di Desa Trunyan	Bali	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
+	17	Pembangunan Pelabuhan Danau Toba-Sipinggan	Sumut	Unit	0	1	1	0	1		-	21,90	27,84	-	-	49,74	Dit.TSDP
	6	Pembangunan Pelabuhan Danau Toba-Onan Rungu	Sumut	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	7	Pembangunan Pelabuhan Danau Toba-Porsea	Sumut	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	8	Pembangunan Pelabuhan Danau Toba-Silalahi	Sumut	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	9	Pembangunan Pelabuhan Danau Sentani-Yuhiwa	Papua	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	10	Pembangunan Pelabuhan Danau Kerinci*	Jambi	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	11	Pembangunan Pelabuhan Danau Lindu*	Sulteng	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	12	Pembangunan Pelabuhan Danau Poso*	Sulteng	Unit	0	1	1	1	0		-	8,75	15,00	15,00	-	38,75	Dit.TSDP
	13	Pembangunan Pelabuhan Danau Waduk Babak Cisentul*	Jabar	Unit	0	0	1	1	1		-	-	10,00	15,00	15,00	40,00	Dit.TSDP
	14	Pembangunan Pelabuhan Danau Laut Tawar*	Aceh	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	10,00	15,00	25,00	Dit.TSDP
	15	Pembangunan Pelabuhan Danau Ranau Pekon Tawan-Suka Banjar*	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	16	Pembangunan Pelabuhan Danau Ranau Pekon Tawan-Suka Mulya*	Lampung	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
15		Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (Buy The Service)	Tersebar	Lokasi	5	9	12	15	21	21	250,00	450,00	600,00	730,00	930,00	2.960,00	Dit.AJ
	1	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Medan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sumut	Layanan	1	1	1	1	1		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dit.AJ
	2	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sumsel	Layanan	1	1	1	1	1		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dit.AJ
	3	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Yogyakarta	DIY	Layanan	1	1	1	1	1		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dit.AJ
	4	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Bali	Layanan	1	1	1	1	1		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dit.AJ
	5	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Surakarta	Jateng	Layanan	1	1	1	1	1		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dit.AJ
	6	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Bandung (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Jabar	Layanan	0	1	1	1	1		-	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Dit.AJ
	7	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Surabaya (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Jatim	Layanan	0	1	1	1	1		-	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Dit.AJ
	8	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Banjarmasin (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Kalsel	Layanan	0	1	1	1	1		-	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Dit.AJ
	9	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Makassar (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sulsel	Layanan	0	1	1	1	1		-	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Dit.AJ
	10	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Batam	Kepri	Layanan	0	0	1	1	1		-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dit.AJ
	11	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Semarang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Jateng	Layanan	0	0	1	1	1		-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dit.AJ
	12	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Pekanbaru	Riau	Layanan	0	0	1	1	1		-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dit.AJ
	13	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Manado (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sulut	Layanan	0	0	0	1	1		-	-	-	50,00	50,00	100,00	Dit.AJ
	14	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sorong (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Papua Barat	Layanan	0	0	0	1	1		-	-	-	30,00	30,00	60,00	Dit.AJ
	15	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Mataram	NTB	Layanan	0	0	0	1	1		-	-	-	50,00	50,00	100,00	Dit.AJ
	16	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Tanjung Selor (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Kaltara	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.AJ
	17	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sotthi (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Malut	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.AJ
	18	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Maja (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Banten	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.AJ
	19	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Salatiga	Jateng	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.AJ
	20	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Singkawang	Kalbar	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.AJ
	21	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Balikpapan	Kaltim	Layanan	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.AJ
4638		Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat									577,86	1.563,10	1.485,03	1.248,00	917,30	5.791,30	Ditjen Hubdat
01		Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Tersebar	Unit	16	13	19	9	10	63	322,50	747,10	610,03	270,00	300,00	2.249,64	Dit.PTJ
	1	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Guntur Melati	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		20,00	-	-	-	-	20,00	Dit.PTJ
	2	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mangkang	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		40,00	-	-	-	-	40,00	Dit.PTJ
	3	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tirtanadi	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		40,00	-	-	-	-	40,00	Dit.PTJ
	4	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pekalongan	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.PTJ
	5	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purwokerto	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		25,00	-	-	-	-	25,00	Dit.PTJ
	6	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Amplas	Sumut	Unit	1	0	0	0	0		20,00	70,00	-	-	-	90,00	Dit.PTJ
	7	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Rajabasa	Lampung	Unit	1	0	0	0	0		25,00	20,00	-	-	-	45,00	Dit.PTJ
	8	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Harjamukti	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		20,00	29,00	-	-	-	49,00	Dit.PTJ
	9	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Leuwipanjang	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		25,00	65,00	-	-	-	90,00	Dit.PTJ
	10	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mengwi	Bali	Unit	1	0	0	0	0		15,00	20,00	-	-	-	35,00	Dit.PTJ
	11	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mambo	Sulteng	Unit	1	0	0	0	0		7,50	30,00	-	-	-	37,50	Dit.PTJ
	12	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Samarinda Seberang	Kaltim	Unit	1	0	0	0	0		20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dit.PTJ
	13	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Puuwatu	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		15,00	50,00	-	-	-	65,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	14	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purboyo	Jatim	Unit	1	1	0	0	0		5,00	50,00	-	-	-	55,00	Dir.PTJ
	15	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tamanan	Jatim	Unit	1	1	0	0	0		15,00	52,00	-	-	-	67,00	Dir.PTJ
	16	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Induk Lumpue	Sulsel	Unit	1	1	0	0	0		20,00	21,00	-	-	-	41,00	Dir.PTJ
	17	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pakupatan	Banten	Unit	0	1	0	0	0		-	30,56	-	-	-	30,56	Dir.PTJ
	18	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bowen	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
	19	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Induk Pemalang	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
	20	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Ir. Sukarno	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
	21	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tegal	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	50,00	-	-	-	50,00	Dir.PTJ
	22	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tingkir	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
	23	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Banjar	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	35,00	-	-	-	35,00	Dir.PTJ
	24	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Cepu	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	35,00	-	-	-	35,00	Dir.PTJ
	25	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Arya Wiraraja	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
	26	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tanjung Pinggir	Sumut	Unit	0	1	1	0	0		-	19,54	26,03	-	-	45,58	Dir.PTJ
	27	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Lhokseumawe	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	37,00	-	-	37,00	Dir.PTJ
	28	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Meulaboh	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	20,00	-	-	20,00	Dir.PTJ
	29	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Batoh	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	40,00	-	-	40,00	Dir.PTJ
	30	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Giwangan	DIY	Unit	0	0	1	0	0		-	-	40,00	-	-	40,00	Dir.PTJ
	31	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Arjosari	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
	32	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mandalika	NTB	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	33	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Paya Ilang	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	22,00	-	-	22,00	Dir.PTJ
	34	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Indhiang	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
	35	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Patria	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	36	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bobot Sari	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	50,00	-	-	50,00	Dir.PTJ
	37	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kebumen	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
	38	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mendolo	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	39	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Selo Aji	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	40	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Dhaksinaga	DIY	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	41	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kambang Putih	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	42	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kertonegoro	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	43	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tawangalun	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	44	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sumer Payung	NTB	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
	45	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pinang Baris	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	46	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Jati	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	47	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Alam Barajo	Jambi	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	48	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sibolga	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	49	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Langsa	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	50	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Madya	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	51	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bareh Solok	Sumbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	52	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	53	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purworejo	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
	54	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Muara Bungo	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
	55	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Barru	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
	56	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Rejang Lebong	Bengkulu	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
	57	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bangko	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
	58	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Batu Kuning	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	59	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Oku	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.PTJ
	60	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Surodakan	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.PTJ
	61	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bone	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.PTJ
	62	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kasintuwu	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.PTJ
	63	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipalayo	Sulbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.PTJ
02		Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Tersebar	Unit	11	10	14	14	12	55	165,00	150,00	210,00	210,00	180,00	915,00	Dit.TSDP
	1	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sinabang (Aceh)	Aceh	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	2	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Taipa (Sulteng)	Sulteng	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	3	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo (Gorontalo)	Gorontalo	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	4	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lembah (Sulut)	Sulut	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	5	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang (Sulut)	Sulut	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	6	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lasusua (Sultra)	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	7	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa (Gorontalo)	Gorontalo	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	8	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dobo (Maluku)	Maluku	Unit	1	1	0	0	0		15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	9	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bara (Maluku)	Maluku	Unit	1	1	0	0	0		15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	10	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus (Sumbar)	Sumbar	Unit	1	1	0	0	0		15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	11	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api (Sumsel)	Sumsel	Unit	1	1	0	0	0		15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dit.TSDP
	12	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan (Riau)	Riau	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	13	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalianget (Jatim)	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	14	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kariangau (Kaltim)	Kaltim	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	15	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sebatik (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	16	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	17	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Nangekeo (NTT)	NTT	Unit	0	1	0	0	0		-	15,00	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	18	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bai (Bengkulu)	Bengkulu	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	19	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sedai (Babel)	Babel	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	20	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	21	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dabo (Kepri)	Kepri	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	22	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Musi (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	23	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Ancam (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	24	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kendari (Sultra)	Sultra	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	25	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kabaaran (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	26	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marore (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	27	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kangean (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	28	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sapudi (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	29	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Banggai (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	30	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lenggara (Sultra)	Sultra	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	31	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pananaru (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	1	1	0		-	-	15,00	15,00	-	30,00	Dit.TSDP
	32	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Melonguane (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	33	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Raas (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	34	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua (Malut)	Malut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	35	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sofifi (Malut)	Malut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	36	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Waigeo (Papua Barat)	Papua Barat	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	37	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Siberut (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	38	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sikakap (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	39	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Bawean (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	40	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Parit Rempak (Kepri)	Kepri	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	41	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Geser (Maluku)	Maluku	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	42	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida (Bali)	Bali	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	43	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marapokot (NTT)	NTT	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.TSDP
	44	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia (Kepri)	Kepri	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	15,00	15,00	30,00	Dit.TSDP
	45	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dompok (Kepri)	Kepri	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	46	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	47	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tarakan (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	48	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marampit (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	49	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Ketapang (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	50	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang (Maluku)	Maluku	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	51	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tali-Tali (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	52	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gorom (Maluku)	Maluku	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	53	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Bobong (Malut)	Malut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	54	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Subaim (Malut)	Malut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
	55	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tobelo (Maluku Utara)	Maluku Utara	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.TSDP
03		Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersebar	Unit	2	10	13	12	9	44	20,00	100,00	130,00	120,00	90,00	460,00	Dit.TSDP
	1	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Remu (Papua Barat)	Papua Barat	Unit	1	0	0	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	2	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Musi 16 Ilir (Palembang)	Sumsel	Unit	1	1	0	0	0		10,00	10,00	-	-	-	20,00	Dit.TSDP
	3	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Barambai (Kalsel)	Kalsel	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	4	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Mintin (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	5	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Klamono (Papua Barat)	Papua Barat	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	6	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Suator (Papua)	Papua	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	7	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Simpang PU (Sumsel)	Sumsel	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	8	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Muara Sabah (Jambi)	Jambi	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	9	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Sei Raya (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	10	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Sepang Simin (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	11	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Kepi (Papua)	Papua	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	12	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Kutai Kartanegara (Kaltim)	Kaltim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	10,00	10,00	-	20,00	Dit.TSDP
	13	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Teluk Batang (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	14	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Batanghari (Jambi)	Jambi	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	15	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Nangasilat (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	16	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Rasau Jaya (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	17	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Long Paso (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	18	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tanjung Selor - Kayan II (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	19	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tanjung Selor - Kayan III (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	20	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Citanduy Manjingkrak (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	21	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Citanduy Padaherang (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	22	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Bengawan Solo (Jateng, Jatim)	Jateng, Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	23	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Wadaslintang (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	24	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Ringin (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	25	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Kayan (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	26	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Mahakam Ulu (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	27	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tanjung Selor - Kayan IV (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	28	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tanjung Selor - Kayan V (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	29	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tembilahan (Riau)	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	30	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Cijulang Kertayasa (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	31	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Brantas (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	32	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Mendawai (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	33	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Kutai Barat (Kaltim)	Kaltim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	34	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Malinau (Kaltara)	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	35	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Mentaya (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	36	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Gasing (Sumsel)	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	37	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Bardan - Siantan (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	38	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Kemboja (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	39	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Sei Ranas (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	40	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tebas Kuala - Perigi Piai (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	41	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Tj. Harapan - Teluk Kalong (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	42	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Pagatan (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	43	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Selat (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	44	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Seruyan (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
04		Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Tersebar	Unit	2	1	3	2	2	10	10,00	30,00	10,00	10,00	10,00	70,00	Dit.TSDP
	1	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Laut Tawar (Aceh)	Aceh	Unit	1	0	0	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
+	2	Rehabilitasi Pelabuhan Waduk Babakan Cisentul (Jabar)	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	3	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Kembang Simpang Tg Nan IV (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	1	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	4	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Kembang Taluak Kinari (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	1	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
	5	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Sembuluh (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	10,00	-	-	-	10,00	Dit.TSDP
+	6	Rehabilitasi Pelabuhan Gajah Mungkur (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	1,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	7	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Singkarak Paninggahan (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	10,00	-	-	10,00	Dit.TSDP
	8	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Maninjau Muko Muko (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	10,00	-	10,00	Dit.TSDP
	9	Rehabilitasi Pelabuhan Danau Toba - Pangururan (Sumut)	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
	10	Rehabilitasi Pelabuhan Waduk Saguling Manuk (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.TSDP
05		Digitalisasi Terminal	Tersebar	Unit	6	11	15	14	9	55	17,66	77,00	105,00	98,00	63,00	360,66	Dit.PTJ
	1	Digitalisasi Terminal Harjamukti	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	2	Digitalisasi Terminal Klaten	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	3	Digitalisasi Terminal Cilacap	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	4	Digitalisasi Terminal Pekalongan	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	5	Digitalisasi Terminal Tirtanadi	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	6	Digitalisasi Terminal Wonogiri	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dit.PTJ
	7	Digitalisasi Terminal Puwatu	Sultra	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	8	Digitalisasi Terminal Rajabasa	Lampung	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	9	Digitalisasi Terminal Guntur Melati	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	10	Digitalisasi Terminal Amplas	Sumut	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	11	Digitalisasi Terminal Leuwipanjang	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	12	Digitalisasi Terminal Purwokerto	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	13	Digitalisasi Terminal Purboyo	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	14	Digitalisasi Terminal Tamanan	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	15	Digitalisasi Terminal Mengwi	Bali	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	16	Digitalisasi Terminal Samarinda Seberang	Kaltim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ
	17	Digitalisasi Terminal Induk Lumpue	Sulsel	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	18 Digitalisasi Terminal Tawangalun	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	19 Digitalisasi Terminal Selo Aji	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	20 Digitalisasi Terminal Pakupatan	Banten	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	21 Digitalisasi Terminal Banjar	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	22 Digitalisasi Terminal Bawen	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	23 Digitalisasi Terminal Bobot Sari	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	24 Digitalisasi Terminal Cepu	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	25 Digitalisasi Terminal Induk Pemalang	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	26 Digitalisasi Terminal Ir. Sukarno	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	27 Digitalisasi Terminal Tegal	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	28 Digitalisasi Terminal Tingkir	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	29 Digitalisasi Terminal Mamboro	Sulteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	30 Digitalisasi Terminal Arya Wiraraja	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	31 Digitalisasi Terminal Kambang Putih	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	32 Digitalisasi Terminal Kertonegoro	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dit.PTJ
	33 Digitalisasi Terminal Mandalika	NTB	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	34 Digitalisasi Terminal Sumer Payung	NTB	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	35 Digitalisasi Terminal Batoh	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	36 Digitalisasi Terminal Lhokseumawe	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	37 Digitalisasi Terminal Meulaboh	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	38 Digitalisasi Terminal Tanjung Pinggir	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	39 Digitalisasi Terminal Indhiang	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	40 Digitalisasi Terminal Paya Ilang	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	41 Digitalisasi Terminal Kebumen	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	42 Digitalisasi Terminal Mendolo	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	43 Digitalisasi Terminal Dhaksinaga	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	44 Digitalisasi Terminal Giwangsan	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	45 Digitalisasi Terminal Arjosari	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	46 Digitalisasi Terminal Patria	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dit.PTJ
	47 Digitalisasi Terminal Madya	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	48 Digitalisasi Terminal Pinang Baris	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	49 Digitalisasi Terminal Sibolga	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	50 Digitalisasi Terminal Purworejo	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	51 Digitalisasi Terminal Langsa	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	52 Digitalisasi Terminal Boleh Solok	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	53 Digitalisasi Terminal Jati	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	54 Digitalisasi Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
	55 Digitalisasi Terminal Alam Barajo	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dit.PTJ
06	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ILTS	Tersebar	Lokasi	12	9	11	18	13	34	42,70	459,00	420,00	540,00	274,30	1.736,00	Dit.AJ
	1 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sumut	Lokasi	1	1	1	1	1		3,00	52,00	40,00	55,00	-	150,00	Dit.AJ
	2 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sulsel	Lokasi	1	1	1	1	0		3,50	70,00	40,00	40,00	-	153,50	Dit.AJ
	3 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Palembang berbasis jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sumsel	Lokasi	1	1	1	1	0		2,50	49,20	25,00	20,00	-	96,70	Dit.AJ
	4 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Denpasar berbasis jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Bali	Lokasi	0	1	1	1	0		3,00	69,00	35,00	35,00	-	142,00	Dit.AJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	5 <i>Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Banjarmasin Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Kalsel	Lokasi	1	0	1	1	1		3,00	-	70,00	40,00	40,00	153,00	Dit.AJ
	6 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jateng	Lokasi	0	1	1	1	0		-	70,00	40,00	40,00	-	150,00	Dit.AJ
	7 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jatim	Lokasi	0	1	1	1	0		-	40,00	30,00	30,00	-	100,00	Dit.AJ
	8 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jabar	Lokasi	0	1	1	1	0		-	38,80	20,00	20,00	12,00	90,80	Dit.AJ
	9 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Manado berbasis jalan yang dikembangkan (PN 2 - Pengembangan Kawasan Perkotaan)</i>	Sulut	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	50,00	-	-	50,00	Dit.AJ
	10 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sorong berbasis jalan yang dikembangkan (PN 2 - Pengembangan Kawasan Perkotaan)</i>	Papua Barat	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	50,00	-	50,00	Dit.AJ
	11 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Tanjung Selor berbasis jalan (PN 2 - Pengembangan Kawasan Perkotaan)</i>	Kaltara	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	50,00	-	50,00	Dit.AJ
	12 <i>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sofifi berbasis jalan yang dikembangkan (PN 2 - Pengembangan Kawasan Perkotaan)</i>	Malut	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.AJ
	13 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Padang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Sumbar	Lokasi	1	0	0	1	0		2,00	-	-	15,00	-	17,00	Dit.AJ
	14 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di di Jambi (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jambi	Lokasi	1	0	0	1	0		3,50	-	-	15,00	-	18,50	Dit.AJ
	15 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Mataram-KSPN Mandalika (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	NTB	Lokasi	1	0	0	1	0		6,70	-	-	35,00	-	41,70	Dit.AJ
	16 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Palu (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Sulteng	Lokasi	1	0	0	1	0		3,50	-	-	15,00	-	18,50	Dit.AJ
	17 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di di Kendari (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Sultra	Lokasi	1	0	0	1	0		3,50	-	-	15,00	-	18,50	Dit.AJ
	18 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Surakarta (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jateng	Lokasi	1	1	0	0	0		2,50	35,00	-	-	-	37,50	Dit.AJ
	19 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Yogyakarta-KSPN Borobudur (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	DIY-Jateng	Lokasi	1	1	0	0	0		3,00	35,00	-	-	-	38,00	Dit.AJ
	20 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Gorontalo (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Gorontalo	Lokasi	1	0	0	0	1		3,00	-	-	-	15,00	18,00	Dit.AJ
	21 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Pekanbaru (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Riau	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dit.AJ
	22 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Batam (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Kepri	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dit.AJ
	23 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Banda Aceh (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Aceh	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	15,00	-	15,00	Dit.AJ
	24 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Belitung-KSPN Tanjung Kelayang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Babel	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	25,00	-	25,00	Dit.AJ
	25 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Balikpapan (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Kaltim	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	25,00	-	25,00	Dit.AJ
	26 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Bengkulu (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Bengkulu	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.AJ
	27 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Bandar Lampung (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Lampung	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.AJ
	28 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Maja (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Banten	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10,00	10,00	Dit.AJ
	29 <i>Pengembangan Integrated Land Transport System di Salatiga (PN 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Jateng	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	12,50	12,50	Dit.AJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	30 Pengembangan Integrated Land Transport System di Malang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Jatim	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	12,30	12,30	Dit.AJ
	31 Pengembangan Integrated Land Transport System di Singkawang (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Kalbar	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.AJ
	32 Pengembangan Integrated Land Transport System di Palangkaraya (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Kalteng	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	12,50	12,50	Dit.AJ
	33 Pengembangan Integrated Land Transport System di Kalimantan Timur (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Kaltim	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.AJ
	34 Pengembangan Integrated Land Transport System di Ambon (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Maluku	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	15,00	15,00	Dit.AJ
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat									871,09	2.318,60	2.570,09	2.893,12	2.695,84	11.348,74	Ditjen Hubdat
01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	Tersebar	Provinsi	33	33	33	33	33	33	618,00	1.720,50	1.720,50	1.720,50	1.720,50	7.500,00	Dit.LLJ
02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersebar	Provinsi	33	33	33	33	33	33	23,22	73,34	85,83	73,99	80,52	336,91	Dit.LLJ
03	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Tersebar	Lokasi	12	14	14	16	6	62	7,00	3,50	3,40	4,00	1,60	19,50	Dit.LLJ
04	Penanganan Perlintasan Sebidang	Tersebar	Lokasi	6	8	7	5	3	29	2,10	2,40	2,28	1,75	1,13	9,65	Dit.LLJ
05	Rehabilitasi UPPKB	Tersebar	Unit	8	46	50	50	58	80	25,00	115,00	125,00	125,00	145,00	535,00	Dit.PTJ
	1 Rehabilitasi UPPKB Tanjung Balik (Sumbar)	Sumbar	Unit	1	0	0	0	0		3,13	-	-	-	-	3,13	Dit.PTJ
	2 Rehabilitasi UPPKB Losarang (Jabar)	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		3,13	-	-	-	-	3,13	Dit.PTJ
	3 Rehabilitasi UPPKB Guyangan (Jatim)	Jatim	Unit	1	0	0	0	0		3,13	-	-	-	-	3,13	Dit.PTJ
	4 Rehabilitasi UPPKB Anjir Serapat (Kalteng)	Kalteng	Unit	1	0	0	0	0		3,13	-	-	-	-	3,13	Dit.PTJ
	5 Rehabilitasi UPPKB Molotabu (Gorontalo)	Gorontalo	Unit	1	0	0	0	0		3,13	-	-	-	-	3,13	Dit.PTJ
	6 Rehabilitasi UPPKB Inobonto (Sulut)	Sulut	Unit	1	0	0	0	1		3,13	-	-	-	3,50	6,63	Dit.PTJ
	7 Rehabilitasi UPPKB Siantan (Kalbar)	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0		3,13	3,50	3,50	-	-	10,13	Dit.PTJ
	8 Rehabilitasi UPPKB Kintap (Kalsel)	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0		3,13	3,50	3,50	-	-	10,13	Dit.PTJ
	9 Rehabilitasi UPPKB Beru-Beru (Sulbar)	Sulbar	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	10 Rehabilitasi UPPKB Dadae (Sulse)	Sulse	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	11 Rehabilitasi UPPKB Sarjo (Sulbar)	Sulbar	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	12 Rehabilitasi UPPKB Pototano (NTB)	NTB	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	13 Rehabilitasi UPPKB Nun Baun Sabu (NTT)	NTT	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	14 Rehabilitasi UPPKB Palangga (Sulse)	Sulse	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	15 Rehabilitasi UPPKB Samba Opu (Sulse)	Sulse	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	16 Rehabilitasi UPPKB Passo (Maluku)	Maluku	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	17 Rehabilitasi UPPKB Balonggandu (Jabar)	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	18 Rehabilitasi UPPKB Kintap (Kalsel)	Kalsel	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	19 Rehabilitasi UPPKB Beringin Panti (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	1	0	0	0		-	3,50	-	-	-	3,50	Dit.PTJ
	20 Rehabilitasi UPPKB Kayumalue (Sulteng)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	21 Rehabilitasi UPPKB Sintang (Kalbar)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	22 Rehabilitasi UPPKB Guyangan (Jatim)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	23 Rehabilitasi UPPKB Cimanuk (Banten)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	24 Rehabilitasi UPPKB Lubuk Selasih (Sumbar)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	25 Rehabilitasi UPPKB Sarolangun (Jambi)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	26 Rehabilitasi UPPKB Tomo (Jabar)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	27 Rehabilitasi UPPKB Losarang (Jabar)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	0		-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dit.PTJ
	28 Rehabilitasi UPPKB Balai Raja (Riau)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	1		-	3,50	3,50	3,50	3,50	14,00	Dit.PTJ
	29 Rehabilitasi UPPKB Muara Lembu (Riau)	Kaltim	Unit	0	1	1	1	1		-	3,50	3,50	3,50	3,50	14,00	Dit.PTJ
	30 Rehabilitasi UPPKB	Kaltim	Unit	0	23	25	25	29		-	34,50	37,50	37,50	43,50	153,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	31	Rehabilitasi UPPKB Marisa (Gorontalo)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	32	Rehabilitasi UPPKB Air Haji (Sumbar)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	33	Rehabilitasi UPPKB Muara Tembesi (Jambi)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	34	Rehabilitasi UPPKB Ajibarang (Jateng)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	35	Rehabilitasi UPPKB Watudodol (Jatim)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	36	Rehabilitasi UPPKB Sedarum (Jatim)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	37	Rehabilitasi UPPKB Klakah (Jatim)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	38	Rehabilitasi UPPKB Trosobo (Jatim)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	39	Rehabilitasi UPPKB Merapi (Sumsel)	Kaltim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,50	-	-	3,50	Dir.PTJ
	40	Rehabilitasi UPPKB Senawar Jaya (Sumsel)	Kaltim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dir.PTJ
	41	Rehabilitasi UPPKB Blambangan Umpu (Lampung)	Kaltim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dir.PTJ
	42	Rehabilitasi UPPKB Padang Ulak Tanding (Bengkulu)	Kaltim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dir.PTJ
	43	Rehabilitasi UPPKB Wanareja (Jateng)	Kaltim	Unit	0	0	1	1	0		-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dir.PTJ
	44	Rehabilitasi UPPKB Sungai Penuh (Jambi)	Jambi	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	45	Rehabilitasi UPPKB Kotabaru (Sumsel)	Sumsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	46	Rehabilitasi UPPKB Cikande (Banten)	Banten	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	47	Rehabilitasi UPPKB Gentong (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	48	Rehabilitasi UPPKB Banyudono (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	49	Rehabilitasi UPPKB Taman Martani (DIY)	DIY	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	50	Rehabilitasi UPPKB Kalibaru Manis (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	51	Rehabilitasi UPPKB Singosari (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	52	Rehabilitasi UPPKB Walenrang (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	53	Rehabilitasi UPPKB Bulu Dua (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	54	Rehabilitasi UPPKB Maccopa (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dir.PTJ
	55	Rehabilitasi UPPKB Cibaragalan (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	56	Rehabilitasi UPPKB Jambi Merlung (Jambi)	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	57	Rehabilitasi UPPKB Pineleng (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	58	Rehabilitasi UPPKB Sojoanging (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	59	Rehabilitasi UPPKB Subah (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	60	Rehabilitasi UPPKB Tanjung (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	61	Rehabilitasi UPPKB Tana Batue (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	62	Rehabilitasi UPPKB Tonrokassi (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	63	Rehabilitasi UPPKB Kalitirto (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	64	Rehabilitasi UPPKB Kulwaru (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	65	Rehabilitasi UPPKB Baureno (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	66	Rehabilitasi UPPKB Mojoagung (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	67	Rehabilitasi UPPKB Pajok (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	68	Rehabilitasi UPPKB Rejoso (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	69	Rehabilitasi UPPKB Talun (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	70	Rehabilitasi UPPKB Trowulan (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	71	Rehabilitasi UPPKB Widang (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	72	Rehabilitasi UPPKB Widodaren (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	73	Rehabilitasi UPPKB Mayoa (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	74	Rehabilitasi UPPKB Moutong (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	75	Rehabilitasi UPPKB Watualo (NTT)	NTT	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	76	Rehabilitasi UPPKB Satong (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	77	Rehabilitasi UPPKB Pasar Panas (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	78	Rehabilitasi UPPKB Buntu Datu (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	79	Rehabilitasi UPPKB Larompong (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
	80	Rehabilitasi UPPKB Lumpue (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dir.PTJ
06	Pembangunan UPPKB		Tersebar	Unit	6	8	17	22	26	34	52,80	50,00	275,00	370,00	350,00	1.097,80	Dir.PTJ
	1	Pembangunan UPPKB Sumsel 2 (KPBU-AP)	Sumsel	Unit	1	1	1	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dir.PTJ
	2	Pembangunan UPPKB Riau (KPBU-AP)	Riau	Unit	1	1	1	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dir.PTJ
	3	Pembangunan UPPKB Sumsel 1 (KPBU-AP)	Sumsel	Unit	1	1	1	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dir.PTJ
	4	Pembangunan UPPKB Km 36 Samboja	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0		6,00	10,00	10,00	-	-	26,00	Dir.PTJ
	5	Pembangunan UPPKB Paser	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0		8,40	10,00	10,00	-	-	28,40	Dir.PTJ
	6	Pembangunan UPPKB Tabalong	Kalsel	Unit	1	1	1	1	0		8,40	10,00	10,00	10,00	-	38,40	Dir.PTJ
	7	Pembangunan UPPKB Simpang Runtu	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0		-	10,00	10,00	10,00	-	30,00	Dir.PTJ
	8	Pembangunan UPPKB Sampit Bagendang	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0		-	10,00	10,00	10,00	-	30,00	Dir.PTJ
	9	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 1	Jabodetabek	Unit	0	0	1	1	1		-	-	42,50	10,00	10,00	62,50	Dir.PTJ
	10	Pembangunan UPPKB Sultra 1	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	11	Pembangunan UPPKB Papua 1	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	12	Pembangunan UPPKB Papua Barat 1	Papua Barat	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	13	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 2	Jabodetabek	Unit	0	0	1	1	1		-	-	42,50	10,00	10,00	62,50	Dir.PTJ
	14	Pembangunan UPPKB Sultra 2	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	15	Pembangunan UPPKB Sultra 3	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	16	Pembangunan UPPKB Papua Barat 2	Papua Barat	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	17	Pembangunan UPPKB Papua 2	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dir.PTJ
	18	Pembangunan UPPKB Kaltim 1	Kaltim	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	19	Pembangunan UPPKB Maluku	Malut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	20	Pembangunan UPPKB Kaltara	Kaltara	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	21	Pembangunan UPPKB Kepri 1	Kepri	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	22	Pembangunan UPPKB Babel 1	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	23	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 3	Jabodetabek	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	45,00	10,00	55,00	Dir.PTJ
	24	Pembangunan UPPKB Kepri 2	Kepri	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	25	Pembangunan UPPKB Babel 2	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	26	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 4	Jabodetabek	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	45,00	10,00	55,00	Dir.PTJ
	27	Pembangunan UPPKB Kaltara 2	Kaltara	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dir.PTJ
	28	Pembangunan UPPKB Aceh 1	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
	29	Pembangunan UPPKB Lamandau (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	40,00	40,00	Dir.PTJ
	30	Pembangunan UPPKB Riau 1	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
	31	Pembangunan UPPKB Sumut 1	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
	32	Pembangunan UPPKB Aceh 2	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
	33	Pembangunan UPPKB Sumut 2	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
	34	Pembangunan UPPKB Riau 2	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dir.PTJ
07	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan		Tersebar	Unit	3	10	14	8	12	47	6,00	15,00	21,00	12,00	18,00	72,00	Dir.STJ
	1	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Lampung	Lampung	Unit	1	0	0	0	0		2,00	-	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	2	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Kalimantan Timur	Lampung	Unit	1	1	0	0	0		2,00	3,00	-	-	-	4,00	Dir.STJ
	3	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Riau	Riau	Unit	1	0	1	0	0		2,00	-	3,00	-	-	4,00	Dir.STJ
	4	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Bali	Bali	Unit	0	1	0	0	0		-	3,00	-	-	-	2,00	Dir.STJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS		LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	5	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Kalimantan Barat	Kalbar	Unit	0	1	0	0	0		-	3,00	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	6	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Kalimantan Selatan	Kalsel	Unit	0	1	0	0	0		-	3,00	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	7	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Kalimantan Tengah	Kalteng	Unit	0	1	0	0	0		-	3,00	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	8	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Aceh	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	9	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sumatera Utara	Sumut	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	10	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sumatera Barat	Sumbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	11	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Jambi	Jambi	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	12	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sumatera Selatan	Sumsel	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	13	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Lampung	Lampung	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,00	-	-	2,00	Dir.STJ
	14	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Banten	Banten	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,00	-	2,00	Dir.STJ
	15	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Jawa Barat	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,00	-	2,00	Dir.STJ
	16	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Jawa Tengah	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,00	-	2,00	Dir.STJ
	17	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Jawa Timur	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,00	-	2,00	Dir.STJ
	18	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sulawesi Selatan	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
	19	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sulawesi Tenggara	Sultra	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
	20	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Gorontalo	Gorontalo	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
	21	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Maluku	Maluku	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
	22	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Maluku Utara	Malut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
	23	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Papua	Papua	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dir.STJ
08		Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Tersebar	Unit	4	2	2	2	2	12	8,00	6,60	6,60	6,60	6,60	34,40	Dir.STJ
	1	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Sumatera Utara	Sumut	Unit	1	0	0	0	0		2,00	-	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	2	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kalimantan Selatan	Kalsel	Unit	1	0	0	0	0		2,00	-	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	3	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Sulawesi Selatan	Sulsel	Unit	1	0	0	0	0		2,00	-	-	-	-	2,00	Dir.STJ
	4	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Riau	Riau	Unit	1	1	0	0	0		2,00	3,30	-	-	-	5,30	Dir.STJ
	5	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kalimantan Utara	Kaltara	Unit	0	1	0	0	0		-	3,30	-	-	-	3,30	Dir.STJ
	6	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Jawa Barat	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,30	-	-	3,30	Dir.STJ
	7	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Jawa Tengah	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	3,30	-	-	3,30	Dir.STJ
	8	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kalimantan Barat	Kalbar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,30	-	3,30	Dir.STJ
	9	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kalimantan Timur	Kaltim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,30	-	3,30	Dir.STJ
	10	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Jawa Timur	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,30	3,30	Dir.STJ
	11	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Lampung	Lampung	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,30	3,30	Dir.STJ
09		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Tersebar	Unit	7	25	25	25	25	107	19,51	75,00	75,00	75,00	75,00	319,51	Dir.STJ
10		Pembangunan Taman Edukasi	Tersebar	Unit	0	2	1	2	1	6	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	36,00	Dir.STJ
	1	Pembangunan Taman Edukasi di Jawa Barat	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	4,00	-	-	-	4,00	Dir.STJ
	2	Pembangunan Taman Edukasi di Jawa Tengah	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	4,00	-	-	-	4,00	Dir.STJ
	3	Pembangunan Taman Edukasi di Jawa Timur	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	4,00	-	-	4,00	Dir.STJ
	4	Pembangunan Taman Edukasi di Riau	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	4,00	-	4,00	Dir.STJ
	5	Pembangunan Taman Edukasi di Lampung	Lampung	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	4,00	-	4,00	Dir.STJ
	6	Pembangunan Taman Edukasi di Kalimantan Utara	Kaltara	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	4,00	4,00	Dir.STJ
11		Penyelenggaraan Pekan Keselamatan	Tersebar	Lokasi	11	34	34	34	34	34	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	Dir.STJ
12		Pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	Jabar	Lokasi	1	1	1	1	0	1	5,00	20,00	20,00	250,00	-	295,00	Dir.STJ
13		Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik	Tersebar	Unit	283694	1000000	1500000	1750000	1875000	6408694	6,00	46,40	74,25	90,48	100,13	317,25	Dir.STJ
14		Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar	Unit	25	25	25	25	25	25	17,96	19,75	21,73	23,90	26,27	109,62	Dir.STJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
15	Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Tersebar	Unit	3	7	4	6	4	24	8,84	16,80	13,00	20,00	20,00	78,64	Dit.TSDP
	1 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Nusa Tenggara Timur	NTT	Lokasi	1	1	0	1	0		2,95	2,40	-	3,33	-	8,68	Dit.TSDP
	2 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sulawesi Tenggara	Sultra	Lokasi	1	1	0	1	1		2,95	2,40	-	3,33	5,00	13,68	Dit.TSDP
	3 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Maluku Utara	Malut	Lokasi	1	0	0	0	1		2,95	-	-	-	5,00	7,95	Dit.TSDP
	4 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sumatera Utara	Sumut	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,40	-	-	-	2,40	Dit.TSDP
	5 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Lampung	Lampung	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,40	-	-	-	2,40	Dit.TSDP
	6 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Bangka Belitung	Babel	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,40	-	-	-	2,40	Dit.TSDP
	7 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sulawesi Tengah	Sulteng	Lokasi	0	1	0	1	0		-	2,40	-	3,33	-	5,73	Dit.TSDP
	8 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Gorontalo	Gorontalo	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,40	-	-	-	2,40	Dit.TSDP
	9 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Bali	Bali	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	3,25	-	-	3,25	Dit.TSDP
	10 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sulawesi Utara	Sulut	Lokasi	0	0	1	1	1		-	-	3,25	3,33	5,00	11,58	Dit.TSDP
	11 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Maluku	Maluku	Lokasi	0	0	1	1	1		-	-	3,25	3,33	5,00	11,58	Dit.TSDP
	12 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Kalimantan Timur	Kaltim	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	3,25	-	-	3,25	Dit.TSDP
	13 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Jawa Timur	Jatim	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	3,33	-	3,33	Dit.TSDP
16	Pembangunan Halte Sungai	Tersebar	Lokasi	8	8	4	4	4	28	19,60	55,00	30,00	30,00	65,00	199,60	Dit.TSDP
	1 Pembangunan Halte Sungai di Jambi	Jambi	Lokasi	8	1	0	1	1		19,60	6,88	-	7,50	16,25	50,23	Dit.TSDP
	2 Pembangunan Halte Sungai di Sumatera Selatan	Sumsel	Lokasi	0	1	0	0	1		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	3 Pembangunan Halte Sungai di Sulawesi Barat	Sulbar	Lokasi	0	1	0	0	1		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	4 Pembangunan Halte Sungai di Jawa Tengah	Jateng	Lokasi	0	1	0	0	0		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	5 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Barat	Kalbar	Lokasi	0	1	0	0	0		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	6 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Selatan	Kalsel	Lokasi	0	1	0	0	0		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	7 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Tengah	Kalteng	Lokasi	0	1	0	0	0		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	8 Pembangunan Halte Sungai di Sulawesi Selatan	Sulsel	Lokasi	0	1	0	0	0		-	6,88	-	-	-	6,88	Dit.TSDP
	9 Pembangunan Halte Sungai di Aceh	Aceh	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	7,50	-	-	7,50	Dit.TSDP
	10 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Barat	Kalbar	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	7,50	-	-	7,50	Dit.TSDP
	11 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Timur	Kaltim	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	7,50	-	-	7,50	Dit.TSDP
	12 Pembangunan Halte Sungai di Banten	Banten	Lokasi	0	0	1	1	0		-	-	7,50	7,50	16,25	31,25	Dit.TSDP
	13 Pembangunan Halte Sungai di Jawa Barat	Jabar	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	7,50	16,25	23,75	Dit.TSDP
	14 Pembangunan Halte Sungai di Kalimantan Utara	Kaltara	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	7,50	-	7,50	Dit.TSDP
	15 Pembangunan Halte Sungai di Sulawesi Tengah	Sulteng	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	16,25	16,25	Dit.TSDP
17	Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP	Tersebar	Lokasi	1	2	1	1	1	5	3,00	7,00	5,00	5,00	5,00	25,00	Dit.TSDP
	1 Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Danau Toba	Sumut	Lokasi	1	1	0	0	0		3,00	2,00	-	-	-	5,00	Dit.TSDP
	2 Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Sungai Musi	Sumsel	Lokasi	0	1	0	0	0		-	5,00	-	-	-	5,00	Dit.TSDP
	3 Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Sungai Agats	Papua	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	5,00	-	-	5,00	Dit.TSDP
	4 Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Kalimantan Timur	Kaltim	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	5,00	-	5,00	Dit.TSDP
	5 Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Sungai Sampit	Kalteng	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	5,00	5,00	Dit.TSDP
18	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau	Tersebar	Lokasi	5	9	6	6	3	29	9,40	23,40	26,80	13,30	7,50	80,40	Dit.TSDP
	1 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Riau	Riau	Lokasi	1	1	0	1	0		1,88	2,60	-	2,22	-	6,70	Dit.TSDP
	2 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Jambi	Jambi	Lokasi	1	1	0	0	1		1,88	2,60	-	-	2,50	6,98	Dit.TSDP
	3 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Sumatera Selatan	Sumsel	Lokasi	1	1	0	1	0		1,88	2,60	-	2,22	-	6,70	Dit.TSDP
	4 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Kalimantan Selatan	Kalsel	Lokasi	1	1	1	0	0		1,88	2,60	4,47	-	-	8,95	Dit.TSDP
	5 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Kalimantan Tengah	Kalteng	Lokasi	1	1	1	1	0		1,88	2,60	4,47	2,22	-	11,16	Dit.TSDP
	6 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Bengkulu	Bengkulu	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,60	-	-	-	2,60	Dit.TSDP
	7 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Lampung	Lampung	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,60	-	-	-	2,60	Dit.TSDP
	8 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Kalimantan Barat	Kalbar	Lokasi	0	1	0	0	1		-	2,60	-	-	2,50	5,10	Dit.TSDP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	9 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Papua	Papua	Lokasi	0	1	0	0	0		-	2,60	-	-	-	2,60	Dit.TSDP
	10 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Sumatera Barat	Sumbar	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	4,47	-	-	4,47	Dit.TSDP
	11 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Jawa Barat	Jabar	Lokasi	0	0	1	0	0		-	-	4,47	-	-	4,47	Dit.TSDP
	12 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Kalimantan Timur	Kaltim	Lokasi	0	0	1	1	0		-	-	4,47	2,22	-	6,68	Dit.TSDP
	13 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Kalimantan Utara	Kaltara	Lokasi	0	0	1	1	0		-	-	4,47	2,22	-	6,68	Dit.TSDP
	14 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Jawa Timur	Jatim	Lokasi	0	0	0	1	0		-	-	-	2,22	-	2,22	Dit.TSDP
	15 Pengadaan Rambu Sungai Danau di Sulawesi Tengah	Sulteng	Lokasi	0	0	0	0	1		-	-	-	-	2,50	2,50	Dit.TSDP
19	Pengerukan Alur Pelayaran SDP	Tersebar	Lokasi	1	3	5	2	2	13	70,00	210,00	350,00	140,00	140,00	910,00	Dit.TSDP
20	Pemberian Bantuan Peralatan Pelayanan SDP	Tersebar	Lokasi	25	25	25	25	25	25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Dit.TSDP
21	Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose	Tersebar	Unit	4	3	3	3	4	15	23,15	17,40	19,20	20,10	28,10	107,95	Dit.TSDP
	1 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Sungai Musi	Sumsel	Unit	1	0	0	0	0		7,05	-	-	-	-	7,05	Dit.TSDP
	2 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Sungai Serayu	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		-	-	-	7,90	-	7,90	Dit.TSDP
	3 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Kariangau	Kaltim	Unit	1	0	0	0	0		7,05	-	-	-	-	7,05	Dit.TSDP
	4 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Bastiong	Malut	Unit	1	0	0	0	0		9,05	-	-	-	-	9,05	Dit.TSDP
	5 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Danau Toba	Sumut	Unit	0	3	0	0	0		-	17,40	-	-	-	17,40	Dit.TSDP
	6 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Sungai Sampit	Kalteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	5,80	-	-	5,80	Dit.TSDP
	7 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Sungai Kumai	Kalteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,60	-	-	7,60	Dit.TSDP
	8 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Asmat	Papua	Unit	0	0	1	0	0		-	-	5,80	-	-	5,80	Dit.TSDP
	9 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Cirata	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,10	-	3,10	Dit.TSDP
	10 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Gajah Mungkur	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,30	-	3,30	Dit.TSDP
	11 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Wadas Lintang	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	5,80	-	5,80	Dit.TSDP
	12 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Waduk Kedungombo	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	5,80	5,80	Dit.TSDP
	13 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Danau Batur	Bali	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	3,00	Dit.TSDP
	14 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Kalabahi	NTT	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	5,80	5,80	Dit.TSDP
	15 Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Waduk Bolok	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	13,50	13,50	Dit.TSDP
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat									4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	Ditjen Hubdat
01	Pembentukan Road Safety Center (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	Tersebar	Unit	20	20	20	20	20	20	4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	Dit.STJ

LAMPIRAN III

*“Peta Proyek Strategis Sub Sektor Transportasi Darat
Tahun 2020-2024”*





- LAMPIRAN PETA -

Renstra

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tahun 2020 - 2024





OUTLINE

4637 Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat

Pembangunan Terminal Tipe-A & Terminal Barang	3
Pembangunan Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda ()	4
Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis	5
Pembangunan Bus Air	6
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	7
Pembangunan Pelabuhan Sungai	8
Pembangunan Pelabuhan Danau	9
Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (<i>skema Buy The Service</i>)	10

4638 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat

Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe-A	11
Digitalisasi Terminal Tipe-A	12
Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	13
Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	14
Rehabilitasi Pelabuhan Danau	15
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan/ <i>Integrated Land Transport System</i>	16

4639 Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

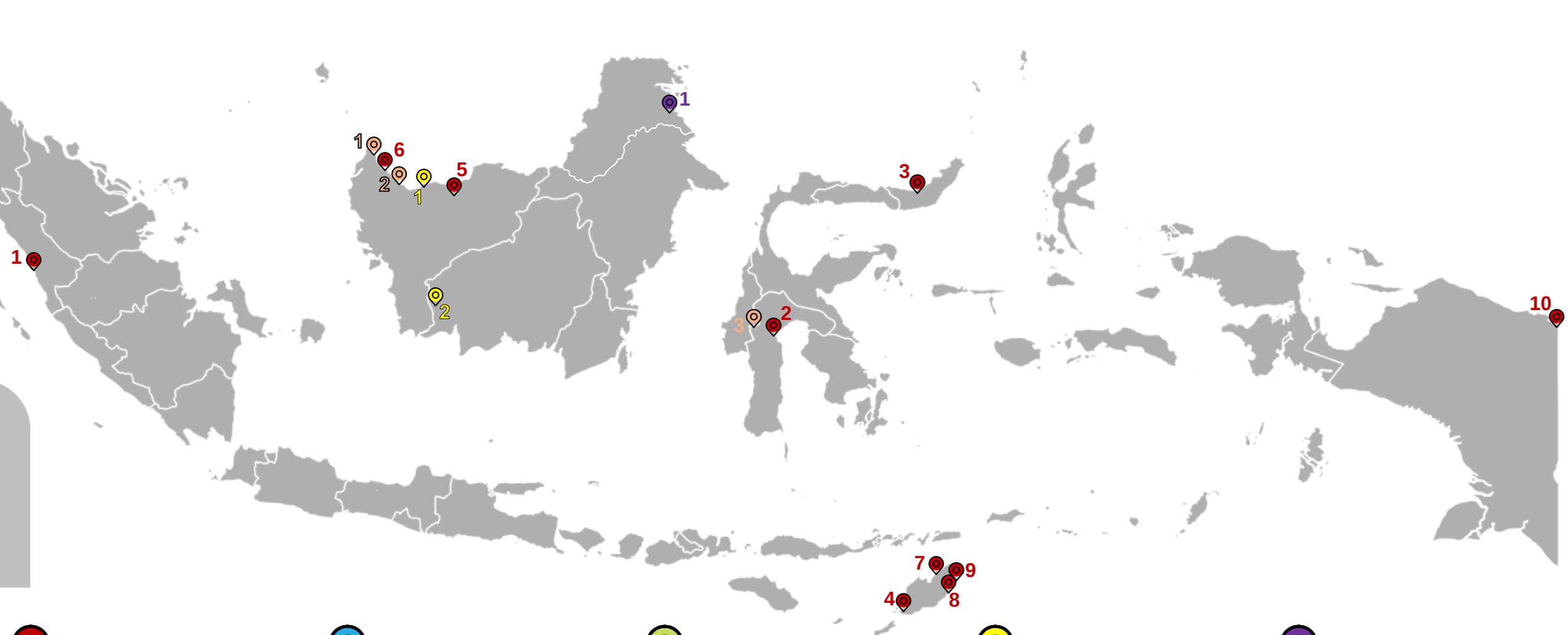
Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	17
Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	18
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	19
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	20
Pembangunan Taman Edukasi	21
Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	22
Pembangunan Rambu Sungai dan Danau	23
Pembangunan Halte Sungai	24
Pengembangan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP	25
Pembangunan Kapal Patroli	26



PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE-A & TERMINAL BARANG

TA. 2020-2024

16
LOKASI



Lanjutan 2019

1. T.Tipe-A Anak Air, **Sumbar**
2. T.Tipe-A Palopo, **Sulsel**
3. T.Tipe-A Boolang Mongondow, **Sulut**
4. T.Tipe-A Bimoku, **NTT**
5. T.Barang Nangabadau, **Kalbar**
6. T.Barang Aruk, **Kalbar**
7. T.Barang Wini, **NTT**
8. T.Barang Motaain, **NTT**
9. T.Barang Motamasin, **NTT**
10. T.Barang Skouw, **Papua**

Baru 2020

1. -

Baru 2021

1. -

Baru 2022

1. T.Tipe-A Sei Kelik, **Kalbar**
2. T.Tipe-A Lamandau, **Kalteng**

Baru 2023

1. T.Tipe-A Tg. Selor, **Kaltara**

Baru 2024

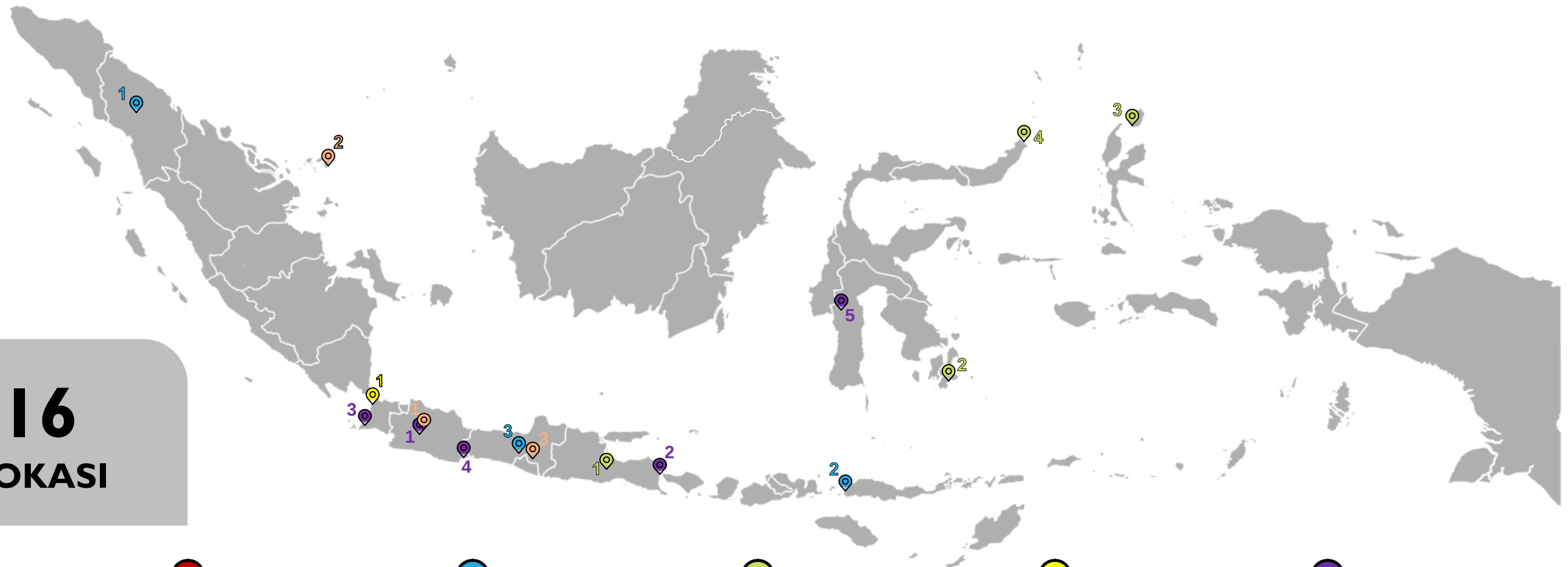
1. T.Tipe-A Termajuk, **Kalbar**
2. T.Tipe-A Jagoibabang, **Kalbar**
3. T.Tipe-A Toraja Utara, **Sulsel**



PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG & INTEGRASI MODA (FASPIM)

TA. 2020-2024

16
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. KSPN Danau Toba, **Sumut**
2. KSPN Labuan Bajo, **NTT**
3. KSPN Borobudur, **Jawa Tengah-DIY**

Baru 2021

1. KSPN Bromo-Tengger Semeru, **Jatim**
2. KSPN Wakatobi, **Sultra**
3. KSPN Morotai, **Malut**
4. KSPN Likupang, **Sulut**

Baru 2022

1. Fasilitas Integrasi Moda Terminal Terpadu Merak, **Banten**

Baru 2023

1. Fasilitas Integrasi Moda Stasiun KA Cepat – Jakarta – Bandung, **Jabar**
2. Fasilitas Integrasi Moda Pelabuhan Ketapang – Terminal Angk. Jalan Banyuwangi, **Jatim**
3. KSPN Tanjung Lesung, **Banten**
4. KSPN Pangandaran, **Jabar**
5. KSPN Toraja, **Sulsel**

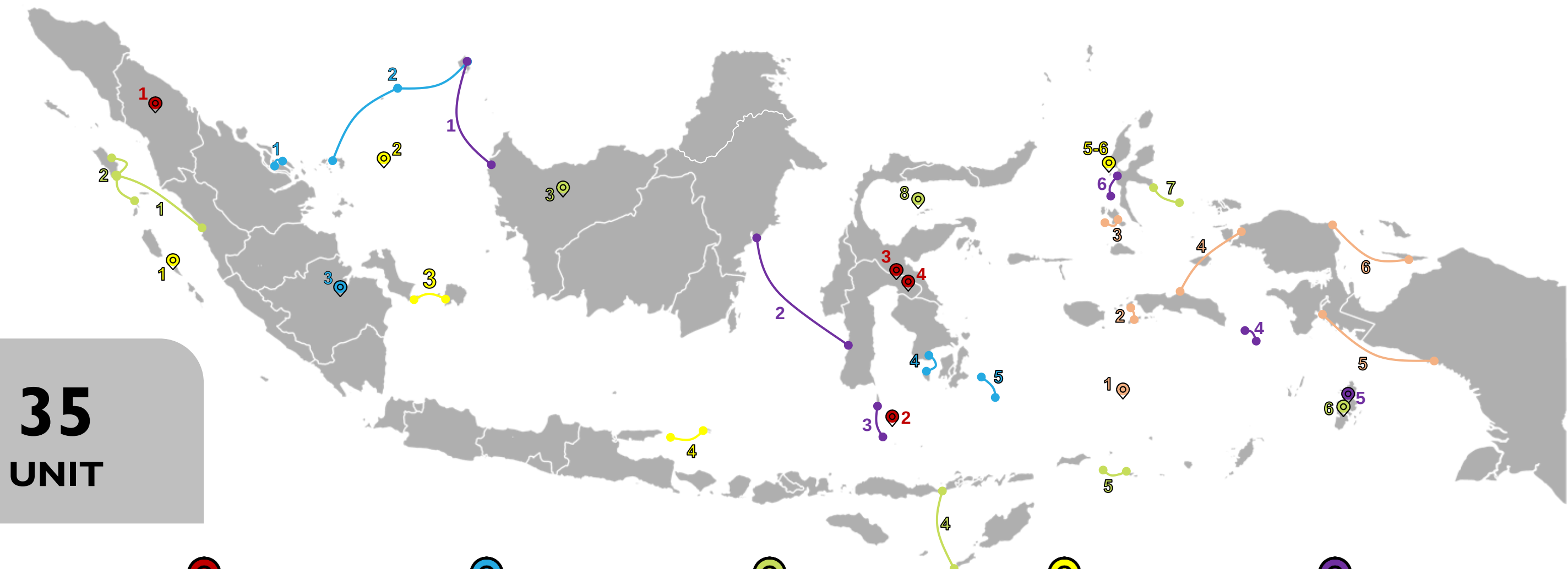
Baru 2024

1. KSPN Kota Bandung, **Jabar**
2. KSPN Lagoi Bintan, **Kep. Riau**
3. Stasiun – Terminal Klaten, **Jateng**



PEMBANGUNAN KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS

TA. 2020-2024



**35
UNIT**

Lanjutan 2019

1. Danau Toba, **Sumut**
2. Selayar, **Sulsel**
3. Danau Matano, **Sulsel**
4. Danau Towuti, **Sulsel**

Baru 2020

1. Pecah Buyung-Alai Insit, **Riau**
2. Tg.Uban-Matak-Penagi, **Kepri**
3. Sri Menanti-Krg Baru, **Sumsel**
4. Bombang-Tg Phising, **Sultra**
5. Kaledupa-Tomia-Binongko, **Sultra**

Baru 2021

1. Tk Dalam-Tk Bungus, **Sumut-Sumbar**
2. Tk Dalam-GnSitoli-P.Batu, **Sumut**
3. Sei Asam-Sunyat, **Kepri**
4. Pamana-Kewapante, **NTT**
5. Kisar-Leti-Moa, **Maluku**
6. Dobo-Lamerang, **Maluku**
7. Patani-Gebe, **Malut**
8. Cadang Perintis Prov Sulsel

Baru 2022

1. Kep. Mentawai, **Sumbar**
2. Cadangan KBI
3. Tg.Ru-Tg.Nyato, **Babel**
4. Sapudi-Kangean, **Jatim**
5. Bastiong-Moti, **Malut**
6. Sofifi-Dowora, **Malut**

Baru 2023

1. Penagi-Sintete, **Kepri-Kalbar**
2. Garongkong-Kariangau, **Kaltim-Sulsel**
3. Patumbukan-P.Tanah Jamea, **Sulsel**
4. Teor-Kesui, **Maluku**
5. Dobo-Benjina-Batugoyang, **Maluku**
6. Sofifi-Makian- Kayoa, **Malut**

Baru 2024

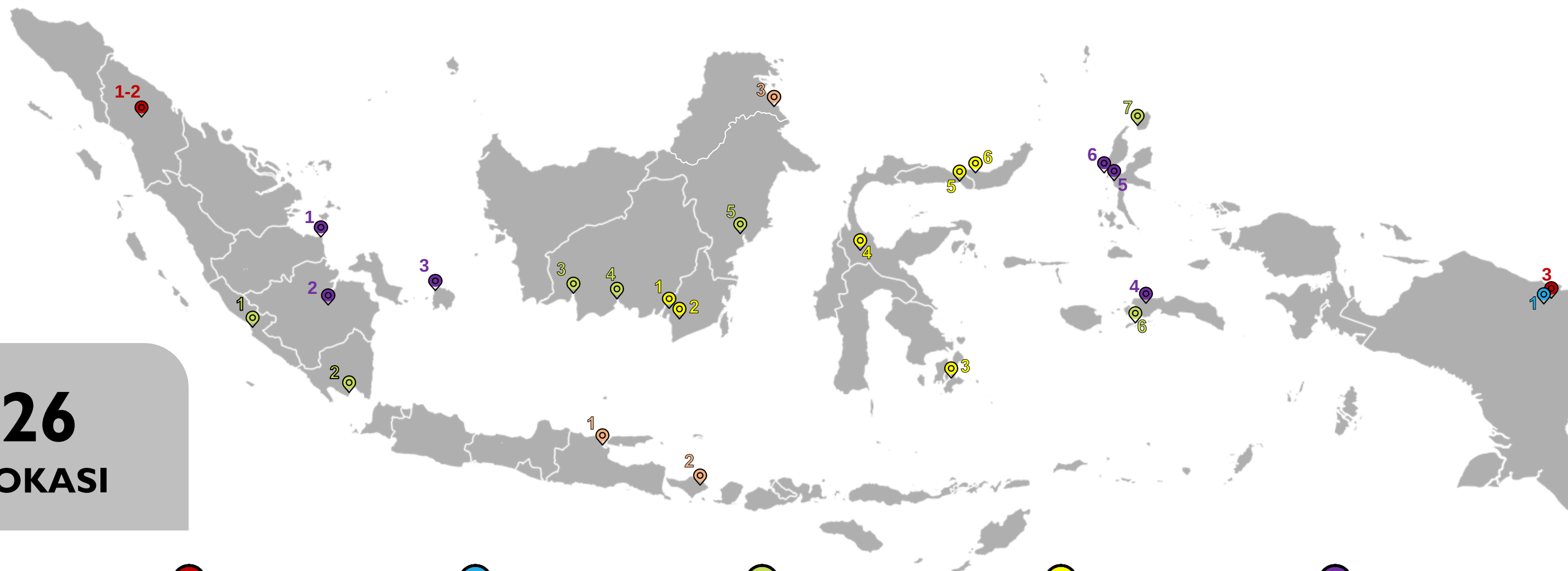
1. Cadangan Perintis KTI
2. Leihitu-Lha-Luhu, **Maluku**
3. Babang-Mandioli, **Malut**
4. Wahai-Foley-Arar, **Maluku-Papua Barat**
5. Kaimana-Pomako, **Papua-Papua Barat**
6. Manokwari-Serui, **Papua-Papua Barat**



PEMBANGUNAN BUS AIR

TA. 2020-2024

26
LOKASI



Lanjutan 2019

1. Danau Toba I, **Sumut**
2. Danau Toba II, **Sumut**
3. Danau Sentani I, **Papua**

Baru 2020

1. Danau Sentani II, **Papua**

Baru 2021

1. Bengkulu, **Bengkulu**
2. Lampung, **Lampung**
3. Sungai Kumai, **Kalteng**
4. Sungai Sampit, **Kalteng**
5. IKN, **Kaltim**
6. Maluku, **Maluku**
7. Morotai, **Malut**

Baru 2022

1. Sungai Barito, **Kalsel**
2. Sungai Martapura, **Kalsel**
3. Sulawesi Tenggara, **Sultra**
4. Danau Lindu, **Sulteng**
5. Gorontalo, **Gorontalo**
6. Boolang Mongondow, **Sulut**

Baru 2023

1. Tg Jabung Timur, **Jambi**
2. Musi Banyuasin, **Sumsel**
3. Bangka Belitung, **Babel**
4. Seram Bagian Barat, **Maluku**
5. Tidore, **Malut**
6. Ternate, **Malut**

Baru 2024

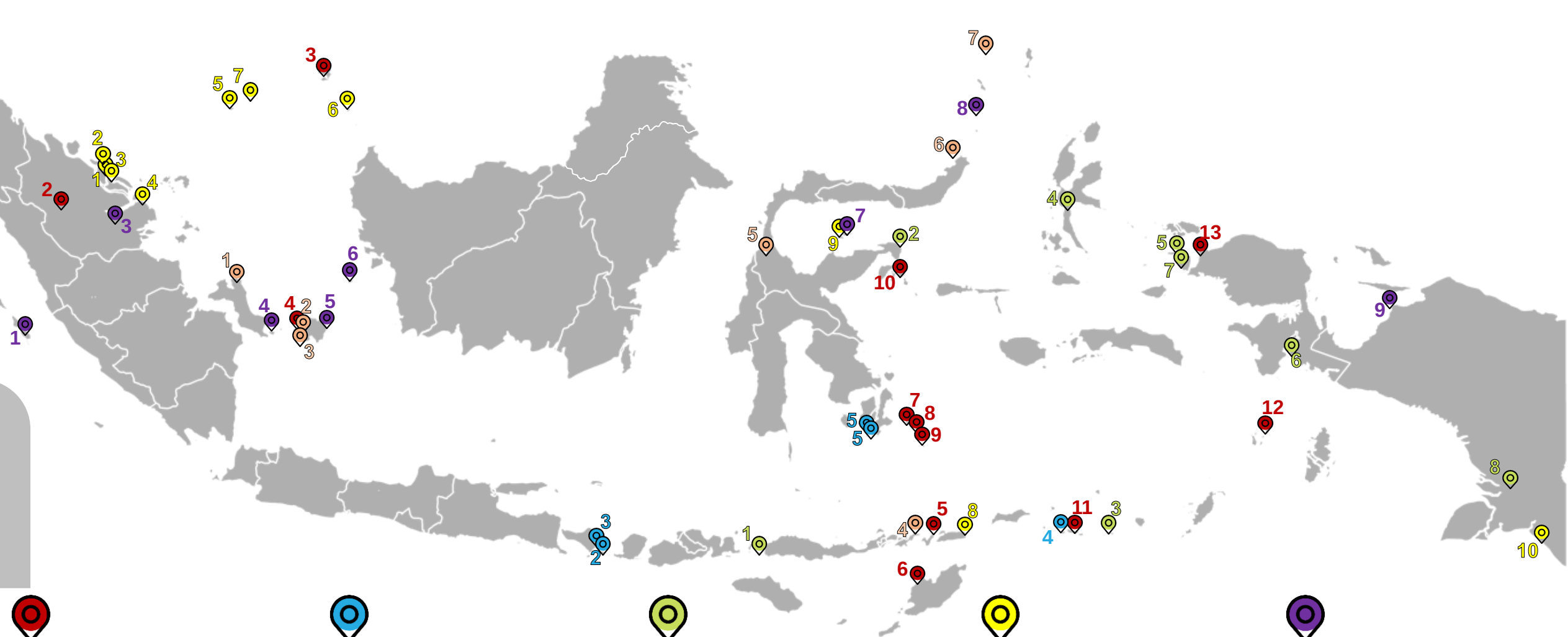
1. Gresik, **Jatim**
2. Danau Batur, **Bali**
3. Kalimantan Utara, **Kaltara**



PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

TA. 2020-2024

53
LOKASI



Lanjutan 2019

1. Tk Dalam, **Sumut**
2. Sagu-Sagu Lukit, **Riau**
3. Sedanau, **Kepri**
4. Tg Nyato, **Babel**
5. Bakalang, **NTT**
6. Naikliu, **NTT**
7. Kaledupa, **Sultra**
8. Tomia, **Sultra**
9. Binongko, **Sultra**
10. Boniton, **Sulteng**
11. Moa, **Maluku**
12. Elat, **Maluku**
13. Klademak, **Papua Barat**

Baru 2020

1. P.Telo, **Sumut**
2. Bias Munjul, **Bali**
3. Sampelan, **Bali**
4. Leti, **Maluku**
5. Kadatua, **Sultra**
6. Siompu, **Sultra**

Baru 2021

1. P. Rinca, **NTT**
2. Pangkalaseang, **Sulteng**
3. Sermata, **Maluku**
4. Weda, **Malut**
5. Batanta, **Papua Barat**
6. Kaimana, **Papua Barat**
7. Salawati, **Papua Barat**
8. Bade, **Papua**

Baru 2022

1. Dakal, **Riau**
2. Ketam Putih, **Riau**
3. P. Burung, **Riau**
4. P. Merbau, **Riau**
5. Letung, **Kepri**
6. Serasan, **Kepri**
7. Tarempa, **Kepri**
8. Maritaing, **NTT**
9. Dolong, **Sulteng**
10. Merauke, **Papua**

Baru 2023

1. Pagai Selatan, **Sumbar**
2. Sikabalu, **Sumbar**
3. Sei Guntung, **Riau**
4. P. Lepar, **Babel**
5. Manggar, **Babel**
6. Kariamata, **Kalbar**
7. Pasokan, **Sulteng**
8. Makalehi, **Sulut**
9. Waren, **Papua**

Baru 2024

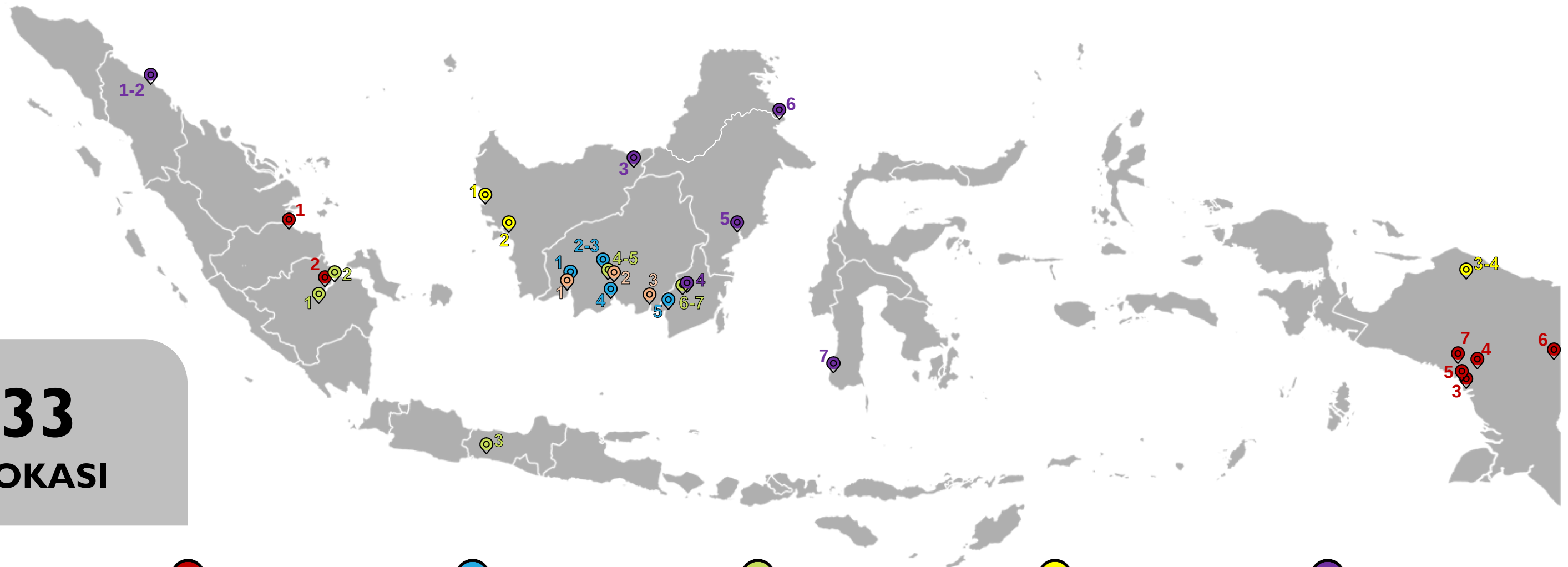
1. Belinyu, **Babel**
2. Tg Ru, **Babel**
3. P. Seliu, **Babel**
4. Wairiang, **NTT**
5. Talise, **Sulteng**
6. Siladen, **Sulut**
7. Kawio, **Sulut**



PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI

TA. 2020-2024

33
LOKASI



Lanjutan 2019

1. Kuala Jambi, **Jambi**
2. Sri Menanti, **Sumsel**
3. Agats, **Papua**
4. Akat, **Papua**
5. Ewer, **Papua**
6. Papera, **Papua**
7. Sawaerma, **Papua**

Baru 2020

1. Kumai, **Kalteng**
2. Mentaya-Pasirih, **Kalteng**
3. Mentaya-Bapinang, **Kalteng**
4. Sei Ijum, **Kalteng**
5. Pasar Lima, **Kalsel**

Baru 2021

1. Musi-7 Ulu, **Sumsel**
2. Delta Upang & Salek, **Sumsel**
3. Serayu, **Jateng**
4. Sampit, **Kalteng**
5. Sampit Seberang, **Kalteng**
6. Pendalaman Baru, **Kalsel**
7. Sei Gampa, **Kalsel**

Baru 2022

1. Tg Saleh, **Kalbar**
2. Tk. Melano, **Kalbar**
3. Burmeso, **Papua**
4. Kasonaweja, **Papua**

Baru 2023

1. Asahan I, **Sumut**
2. Asahan II, **Sumut**
3. Kapuas Hulu, **Kalbar**
4. Palingkau, **Kalsel**
5. IKN, **Kaltim**
6. Gn Tabur, **Kaltim**
7. Benteng Somba Opu, **Sulsel**

Baru 2024

1. Kapiten, **Kalteng**
2. Anjir Sampit, **Kalteng**
3. Bapuju, **Kalteng**



PEMBANGUNAN PELABUHAN DANAU

TA. 2020-2024

22
LOKASI



Lanjutan 2019

1. Toba, **Sumut**
2. Toba, **Sumut**
3. Toba, **Sumut**
4. Toba, **Sumut**
5. Toba, **Sumut**
6. Toba, **Sumut**
7. Toba, **Sumut**
8. Cirata, **Jabar**
9. Tabanan-Bedugul, **Bali**
10. Kuburan-Batur, **Bali**

Baru 2020

1. Yabaso-Sentani, **Papua**

Baru 2021

1. Onan Rungu-Toba, **Sumut**
2. Porsea-Toba, **Sumut**
3. Silalahi-Toba, **Sumut**
4. Kerinci, **Jambi**
5. Lindu, **Sulteng**
6. Poso, **Sulteng**
7. Yuhiwa-Sentani, **Papua**

Baru 2022

1. Babak Cisentul, **Jabar**

Baru 2023

1. Laut Tawar, **Aceh**

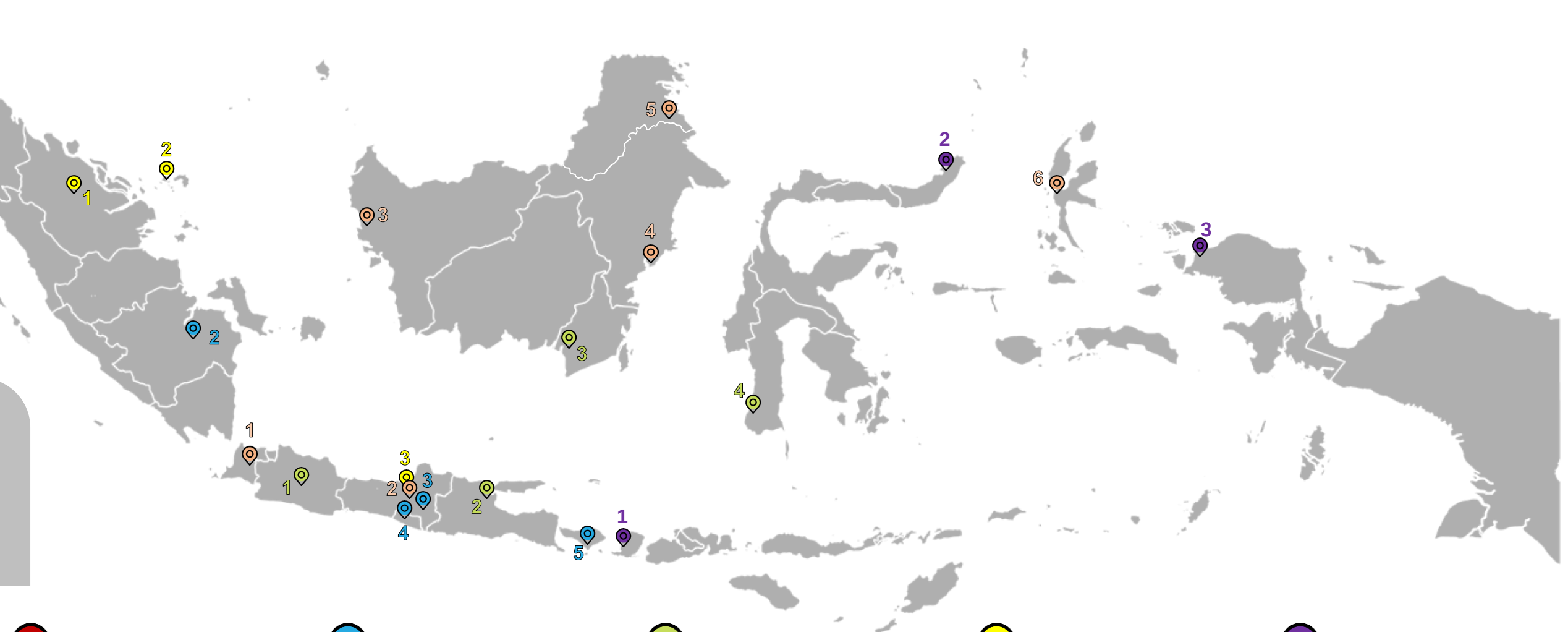
Baru 2024

1. Suka Banjar-Ranau, **Sumsel**
2. Suka Mulya-Ranau, **Lampung**

SUBSIDI ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN (BUY THE SERVICE)

TA. 2020-2024

21
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Medan, **Sumut**
2. Palembang, **Sumsel**
3. Surakarta, **Jateng**
4. Yogyakarta, **DIY**
5. Denpasar, **Bali**

Baru 2021

1. Bandung, **Jabar**
2. Surabaya, **Jatim**
3. Banjarmasin, **Kalsel**
4. Makassar, **Sulsel**

Baru 2022

1. Pekanbaru, **Riau**
2. Batam, **Kepri**
3. Semarang, **Jateng**

Baru 2023

1. Mataram, **NTB**
2. Manado, **Sulut**
3. Sorong, **Papua**

Baru 2024

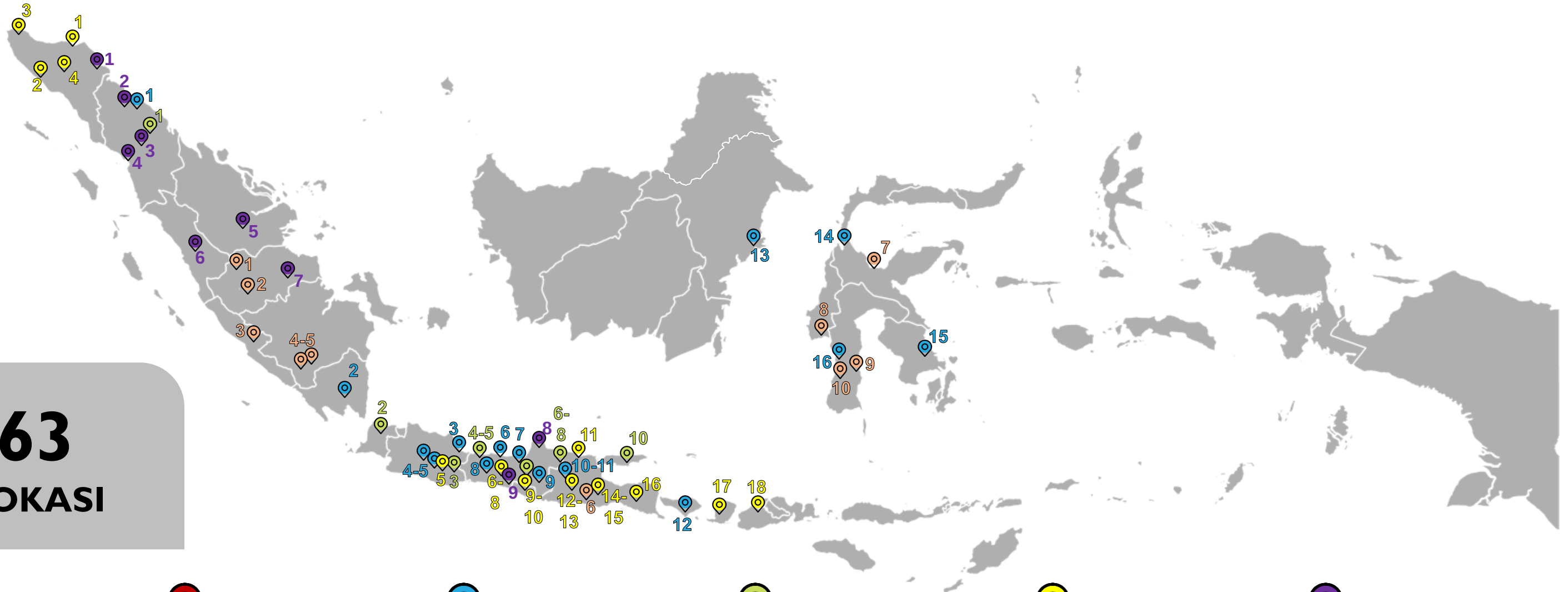
1. Maja, **Banten**
2. Salatiga, **Jateng**
3. Singkawang, **Kalbar**
4. Balikpapan, **Kaltim**
5. Tg. Selor, **Kaltara**
6. Sofifi, **Malut**



REHABILITASI/PENINGKATAN TERMINAL TIPE-A

TA. 2020-2024

63
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Terminal Amplas, **Sumut**
2. Terminal Rajabasa, **Lampung**
3. Terminal Harjamukti, **Jabar**
4. Terminal Leuwipanjang, **Jabar**
5. Terminal Guntur Melati, **Jabar**
6. Terminal Pekalongan, **Jateng**
7. Terminal Mangkang, **Jateng**
8. Terminal Purwokerto, **Jateng**
9. Terminal Tirtonadi, **Jateng**
10. Terminal Purboyo, **Jatim**
11. Terminal Tamanan, **Jatim**
12. Terminal Mengwi, **Bali**
13. Terminal Samarinda Seberang, **Kaltim**
14. Terminal Mamboro, **Sulteng**
15. Terminal Puuwatu, **Sultra**
16. Terminal Induk Lumpue, **Sulsel**

Baru 2021

1. Terminal Tanjung Pinggir, **Sumut**
2. Terminal Pakupatan, **Banten**
3. Terminal Banjar, **Jabar**
4. Terminal Tegal, **Jateng**
5. Terminal Induk Pemalang, **Jateng**
6. Terminal Bawen, **Jateng**
7. Terminal Tingkir, **Jateng**
8. Terminal Ir. Sukarno, **Jateng**
9. Terminal Cepu, **Jateng**
10. Terminal Arya Wiraraja, **Jatim**

Baru 2022

1. Terminal Lhokseumawe, **Aceh**
2. Terminal Meulaboh, **Aceh**
3. Terminal Batoh, **Aceh**
4. Terminal Paya Ilang, **Aceh**
5. Terminal Indihiang, **Jabar**
6. Terminal Bobot Sari, **Jateng**
7. Terminal Kebumen, **Jateng**
8. Terminal Mendolo, **Jateng**
9. Terminal Dhaksinaga, **DIY**
10. Terminal Giwangsan, **DIY**
11. Terminal Kambang Putih, **Jatim**
12. Terminal Kertonegoro, **Jatim**
13. Terminal Selo Aji, **Jatim**
14. Terminal Arjosari, **Jatim**
15. Terminal Patria, **Jatim**
16. Terminal Tawangalun, **Jatim**
17. Terminal Mandalika, **NTB**
18. Terminal Sumer Payung, **NTB**

Baru 2023

1. Terminal Langsa, **Aceh**
2. Terminal Pinang Baris, **Sumut**
3. Terminal Madya, **Sumut**
4. Terminal Sibolga, **Sumut**
5. Terminal Indragiri Hulu, **Riau**
6. Terminal Bareh Solok, **Sumbar**
7. Terminal Alam Barajo, **Jambi**
8. Terminal Jati, **Jawa Tengah**
9. Terminal Purworejo, **Jateng**

Baru 2024

1. Terminal Muara Bungo, **Jambi**
2. Terminal Bangko, **Jambi**
3. Terminal Rejang Lebong, **Bengkulu**
4. Terminal Batu Kuning, **Sumsel**
5. Terminal Oku, **Sumsel**
6. Terminal Surodakan, **Jatim**
7. Terminal Kasintuwu, **Sulteng**
8. Terminal Tipalayo, **Sulbar**
9. Terminal Bone, **Sulsel**
10. Terminal Barru, **Sulsel**



DIGITALISASI TERMINAL TIPE-A

TA. 2020-2024

55
LOKASI

Lanjutan 2019	Baru 2020	Baru 2021	Baru 2022	Baru 2023	Baru 2024
1. -	1. Harjamukti, Jabar 2. Klaten, Jateng 3. Cilacap, Jateng 4. Pekalongan, Jateng 5. Tirtonadi, Jateng 6. Wonogiri, Jateng	1. Puwatu, Sulawesi tenggara 2. Rajabasa, Lampung 3. Guntur Melati, Jawa barat 4. Amplas, sumatera utara 5. Leuwipanjang, jawa barat 6. Purwokerto, jawa tegah 7. Purboyo, jawa timur 8. Tamanan, jawa timur 9. Mengwi, bali 10. Samarinda Seberang, kaltim 11. Induk Lumpue, sulsel	1. Tawang Alun, jawa timur 2. Selo Aji, jawa timur 3. Pakupatan, banten 4. Banjar, jawa barat 5. Bawen, jawa tengah 6. Bobot Sari, jawa tegah 7. Cepu, jawa tengah 8. Induk Pemalang, jateng 9. Ir. Sukarno, jawa tengah 10. Tegal, jawa tengah 11. Tingkir, jawa tengah 12. Mamboro, Sulteng 13. Arya Wiraja, jawa timur 14. Kambang Putih, jawa timur 15. Kerto Negro, jawa timur	1. Mandalika, NTB 2. Sumer Payung, NTB 3. Batoh, Aceh 4. Lhokseumawe, Aceh 5. Meulaboh, Aceh 6. Tanjung Pinggir, sumut 7. Indihiang, jawa barat 8. Paya Ilang, aceh 9. Kebumen, jateng 10. Mendolo, jateng 11. Dhaksinaga, jateng 12. Giwangan, jateng 13. Arjosari, jatim 14. Patria, jatim	1. Madya, sumut 2. Pinang Baris, sumut 3. Sibolga, sumut 4. Purworejo, jawa tengah 5. Langsa, aceh 6. Bareh solok, sumut 7. Jati, jateng 8. Indragili Hulu, riau 9. Alam Barajo, jambi



REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

TA. 2020-2024

55
LOKASI

Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. PP. Sinabang (Aceh)
2. PP. Taipa (Sulteng)
3. PP. Gorontalo (Gorontalo)
4. PP. Lembeh (Sulut)
5. PP. Likupang (Sulut)
6. PP. Lasusua (Sultra)
7. PP. Marisa (Gorontalo)
8. PP. Dobo (Maluku)
9. PP. Teluk Bara (Maluku)
10. PP. Teluk Bungus (Sumbar)
11. PP. Tanjung Api Api (Sumsel)

Baru 2021

1. PP. Mengkapan (Riau)
2. PP. Klianget (Jatim)
3. PP. Kariangau (Kaltim)
4. PP. Sebatik (Kaltara)
5. PP. Sei Jepun (Kaltara)
6. PP. Nangakeo (NTT)

Baru 2022

1. PP. Pulau Baai (Bengkulu)
2. PP. Sadai (Babel)
3. PP. Tua Pejat (Sumbar)
4. PP. Dabo (Kepri)
5. PP. Musi (Sulut)
6. PP. Ancam (Kaltara)
7. PP. Kendari (Sultra)
8. PP. Kabaruang (Sulut)
9. PP. Marore (Sulut)
10. PP. Kangean (Jatim)
11. PP. Sapudi (Jatim)
12. PP. Banggai (Sulteng)
13. PP. Lenggara (Sultra)
14. PP. Pananaru (Sulut)

Baru 2023

1. PP. Melonguane (Sulut)
2. PP. Pulau Raas (Jatim)
3. PP. Batang Dua (Malut)
4. PP. Sofifi (Malut)
5. PP. Waigeo (Papua Barat)
6. PP. Siberut (Sumbar)
7. PP. Sikakap (Sumbar)
8. PP. Bawean (Jatim)
9. PP. Parit Rempak (Kepri)
10. PP. Geser (Maluku)
11. PP. Nusa Penida (Bali)
12. PP. Penyeberangan Marapokot (NTT)
13. PP. Selat Belia (Kepri)

Baru 2024

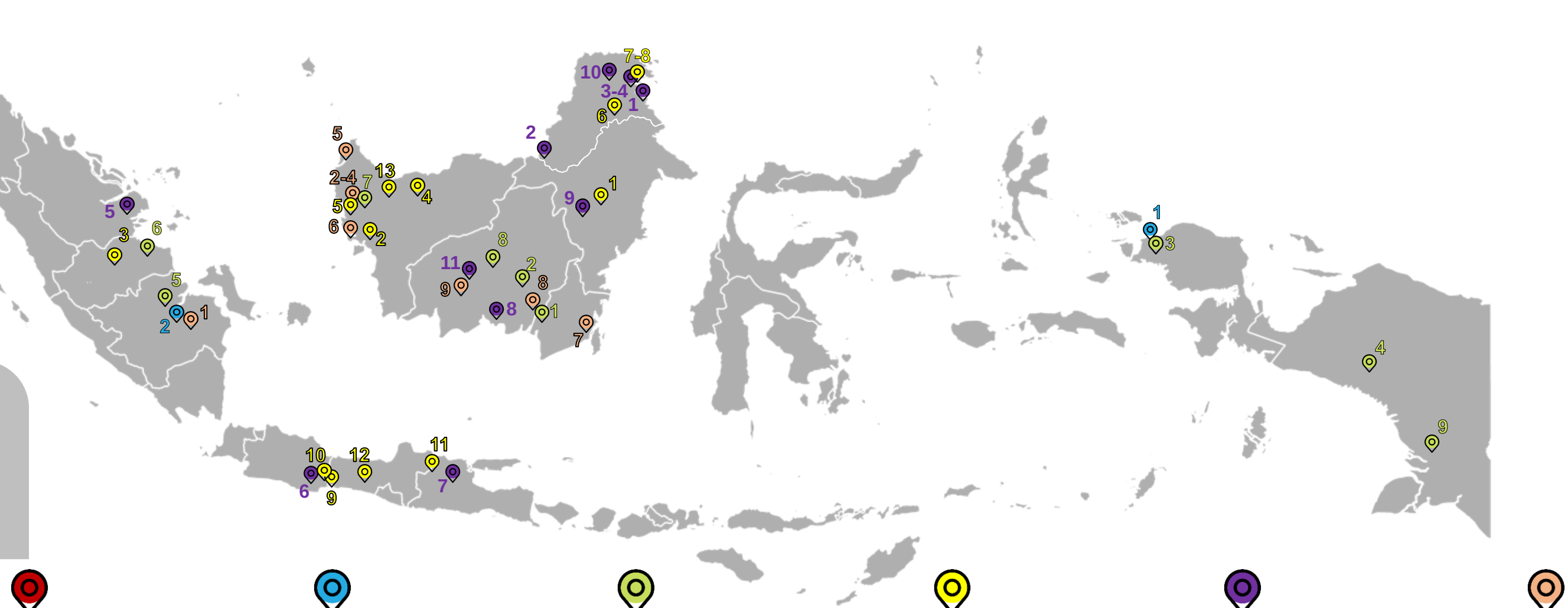
1. PP. Dompok (Kepri)
2. PP. Tagulandang (Sulut)
3. PP. Tarakan (Kaltara)
4. PP. Marampit (Sulut)
5. PP. Ketapang (Kalbar)
6. PP. Air Nanang (Maluku)
7. PP. Toli-Toli (Sulteng)
8. PP. Gorom (Maluku)
9. PP. Bobong (Malut)
10. PP. Subaim (Malut)
11. PP. Tobelo (Maluku Utara).



REHABILITASI PELABUHAN SUNGAI

TA. 2020-2024

44
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Remu (Papua Barat)
2. Musi 16 Ilir (Palembang)

Baru 2021

1. Barambai (Kalsel)
2. Mintin (Kalteng)
3. Klamono (Papua Barat)
4. Suator (Papua)
5. Simpang PU (Sumsel)
6. Muara Sabak (Jambi)
7. Sei Raya (Kalbar)
8. Sepang Simin (Kalteng)
9. Kapi (Papua)

Baru 2022

1. Kutai Kartanegara (Kaltim)
2. Teluk Batang (Kalbar)
3. Batanghari (Jambi)
4. Nangasilat (Kalbar)
5. Rasau Jaya (Kalbar)
6. Long Paso (Kaltara)
7. Tanjung Selor - Kayan II (Kaltara)
8. Tanjung Selor - Kayan III (Kaltara)
9. Citanduy Manjingkrak (Jabar)
10. Citanduy Padaherang (Jabar)
11. Bengawan Solo (Jateng, Jatim)
12. Wadaslintang (Jateng)
13. Ringin (Kalbar)

Baru 2023

1. Kayan (Kaltara)
2. Mahakam Ulu (Kaltara)
3. Tanjung Selor - Kayan IV (Kaltara)
4. Tanjung Selor - Kayan V (Kaltara)
5. Tembilahan (Riau)
6. Cijulang Kertayasa (Jabar)
7. Brantas (Jatim)
8. Mendawai (Kalteng)
9. Kutai Barat (Kaltim)
10. Malinau (Kaltara)
11. Mentaya (Kalteng)

Baru 2024

1. Gasing (Sumsel)
2. Bardan - Siantan (Kalbar)
3. Kemboja (Kalbar)
4. Sei Ranas (Kalbar)
5. Tebas Kuala - Perigi Piai (Kalbar)
6. Tj. Harapan - Teluk Kalong (Kalbar)
7. Pagatan (Kalteng)
8. Selat (Kalteng)
9. Seruyan (Kalteng)



REHABILITASI PELABUHAN DANAU

TA. 2020-2024

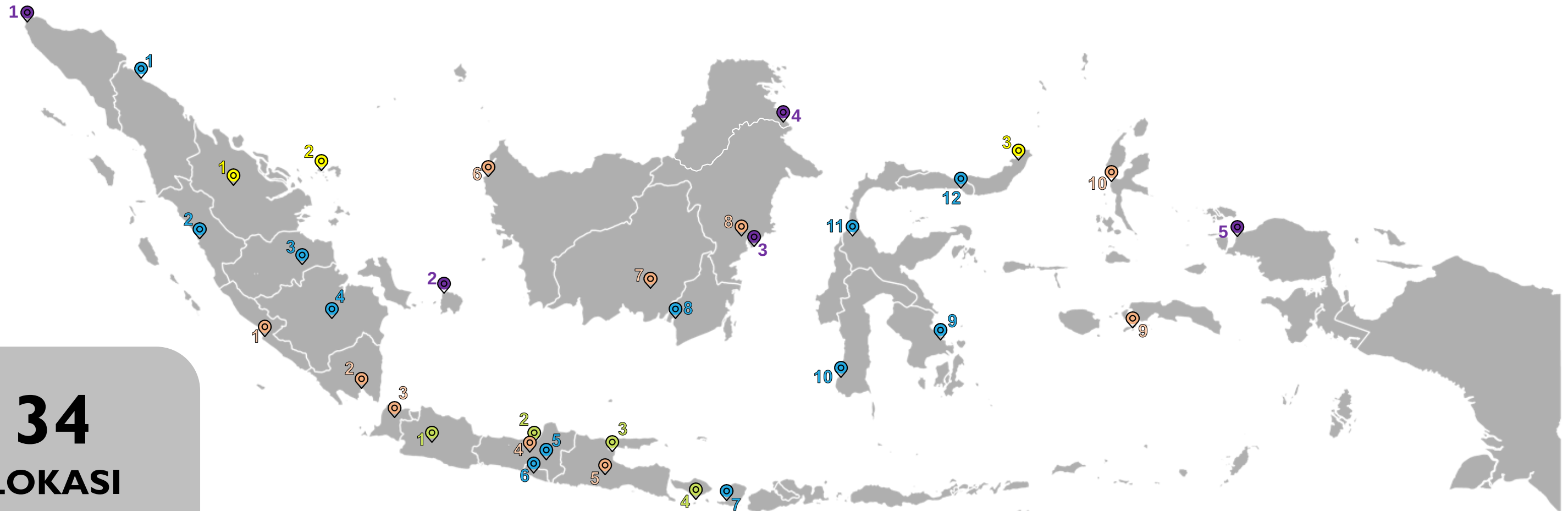


7
LOKASI

Lanjutan 2019	Baru 2020	Baru 2021	Baru 2022	Baru 2023	Baru 2024
I. -	I. Laut Tawar, Aceh	I. Sp.Tg Nan IV-Kembar, Sumbar 2. Taluak Kinari-Kembar, Sumbar 3. Sembuluh, Kalteng	I. Panninggahan-Singkarak, Sumbar	I. Muko-Muko-Maninjau, Sumbar	I. Pangururan-Toba, Sumut

PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN/ILTS

TA. 2020-2024



34
LOKASI

Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Medan, **Sumut**
2. Padang, **Sumbar**
3. Jambi, **Jambi**
4. Palembang, **Sumsel**
5. Surakarta, **Jateng**
6. Yogyakarta, **DIY**
7. KSPN Mandalika, **NTB**
8. Banjarmasin, **Kalsel**
9. Kendari, **Sultra**
10. Makassar, **Sulsel**
11. Palu, **Sulteng**
12. Gorontalo, **Gorontalo**

Baru 2021

1. Bandung, **Jabar**
2. Semarang, **Jateng**
3. Surabaya, **Jatim**
4. Denpasar, **Bali**

Baru 2022

1. Pekanbaru, **Riau**
2. Batam, **Kepri**
3. Manado, **Sulut**

Baru 2023

1. Banda Aceh, **Aceh**
2. Belitung-KSPN Tg Kelayang, **Babel**
3. Balikpapan, **Kaltim**
4. Tg. Selor, **Kaltara**
5. Sorong, **Papua Barat**

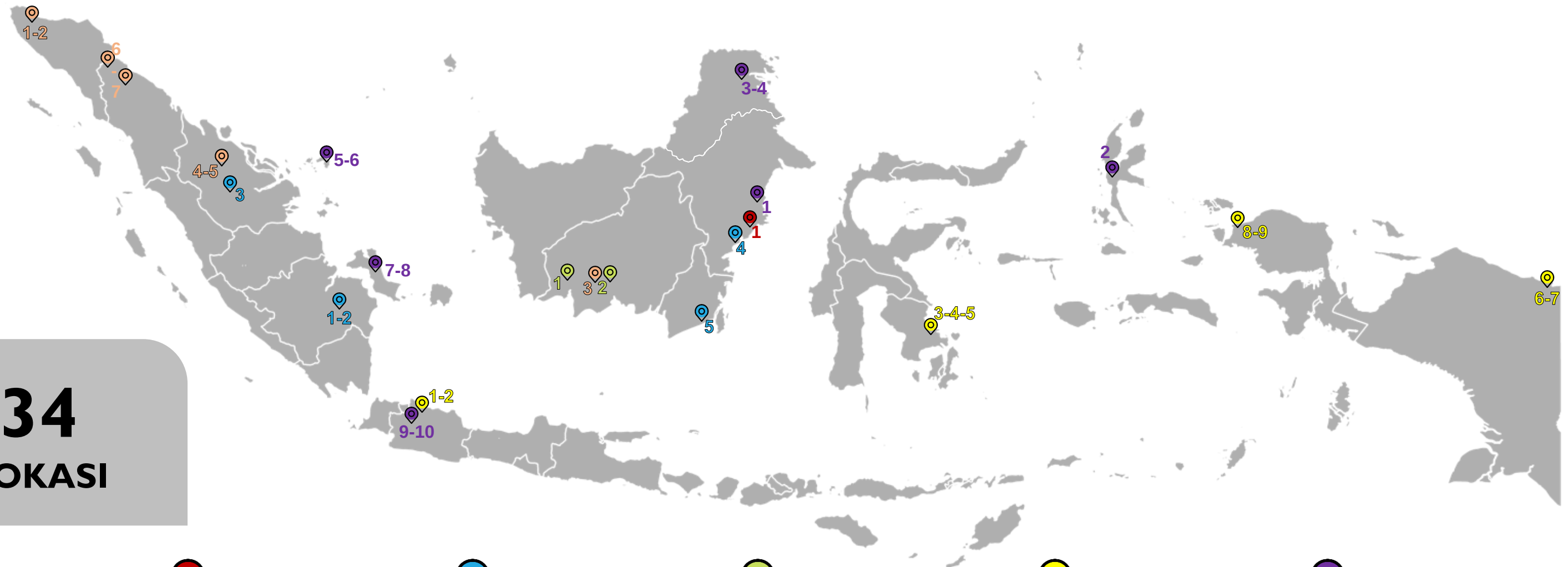
Baru 2024

1. Bengkulu, **Bengkulu**
2. Bd Lampung, **Lampung**
3. Maja, **Banten**
4. Salatiga, **Jateng**
5. Malang, **Jatim**
6. Singkawang, **Kalbar**
7. Palangkaraya, **Kalteng**
8. IKN, **Kaltim**
9. Ambon, **Maluku**
10. Sofifi, **Malut**



PEMBANGUNAN UPPKB

TA. 2020-2024



34
LOKASI

Lanjutan 2019

1. UPPKB Km 36 Samboja, **Kaltim**

Baru 2020

1. UPPKB Sumsel 1 (KPBU-AP), **Sumsel**
2. UPPKB Sumsel 2 (KPBU-AP), **Sumsel**
3. UPPKB Riau (KPBU-AP), **Riau**
4. UPPKB Paser, **Kaltim**
5. UPPKB Tabalong, **Kalsel**

Baru 2021

1. UPPKB Simpang Runtu, **Kalteng**
2. UPPKB Sampit Bagendang, **Kalteng**

Baru 2022

1. UPPKB Jabodetabek 1
2. UPPKB Jabodetabek 2
3. UPPKB Sultra 1, **Sultra**
4. UPPKB Sultra 2, **Sultra**
5. UPPKB Sultra 3, **Sultra**
6. UPPKB Papua 1, **Papua**
7. UPPKB Papua 2, **Papua**
8. UPPKB Papua Barat 1, **Papua Barat**
9. UPPKB Papua Barat 2, **Papua Barat**

Baru 2023

1. UPPKB Kaltim 1, **Kaltim**
2. UPPKB Malut, **Malut**
3. UPPKB Kaltara, **Kaltara**
4. UPPKB Kaltara 2, **Kaltara**
5. UPPKB Kepri 1, **Kepri**
6. UPPKB Kepri 2, **Kepri**
7. UPPKB Babel 1, **Babel**
8. UPPKB Babel 2, **Babel**
9. UPPKB Jabodetabek 3
10. UPPKB Jabodetabek 4

Baru 2024

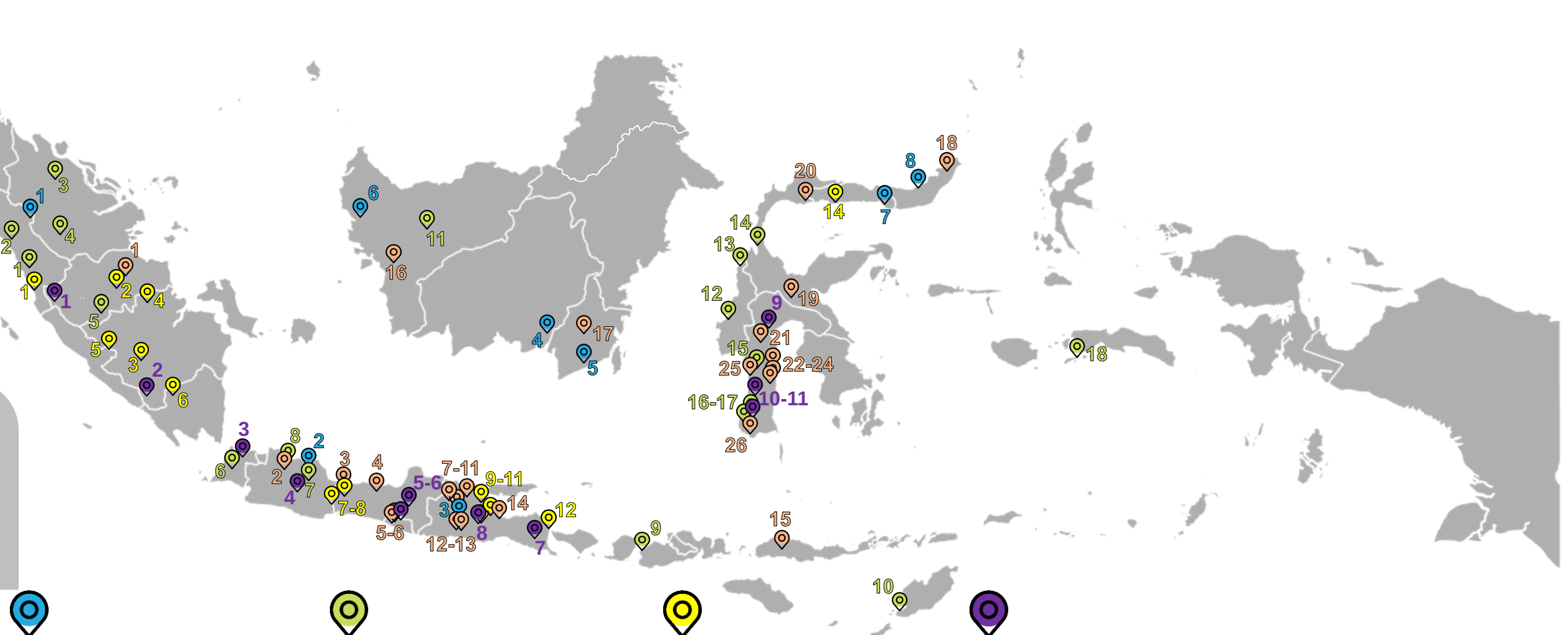
1. UPPKB Aceh 1, **Aceh**
2. UPPKB Aceh 2, **Aceh**
3. UPPKB Lamandau, **Kalteng**
4. UPPKB Riau 1, **Riau**
5. UPPKB Riau 2, **Riau**
6. UPPKB Sumut 1, **Sumut**
7. UPPKB Sumut 2, **Sumut**



REHABILITASI UPPKB

TA. 2020-2024

79
LOKASI



Baru 2020

1. UPPKB Tanjung Balik, **Sumbar**
2. UPPKB Losarang, **Jabar**
3. UPPKB Guyangan, **Jatim**
4. UPPKB Anjir Serapat, **Kalteng**
5. UPPKB Kintap, **Kalsel**
6. UPPKB Siantan, **Kalbar**
7. UPPKB Molotabu, **Gorontalo**
8. UPPKB Inobonto, **Sulut**

Baru 2021

1. UPPKB Lubuk Selasih, **Sumbar**
2. UPPKB Beringin Panti, **Sumbar**
3. UPPKB Balai Raja, **Riau**
4. UPPKB Muara Lembu, **Riau**
5. UPPKB Sarolangun, **Jambi**
6. UPPKB Cimanuk, **Banten**
7. UPPKB Tomo, **Jabar**
8. UPPKB Balonggandu, **Jabar**
9. UPPKB Pototano, **NTB**
10. UPPKB Nun Baun Sabu, **NTT**
11. UPPKB Sintang, **Kalbar**
12. UPPKB Beru-Beru, **Sulbar**
13. UPPKB Sarjo, **Sulbar**
14. UPPKB Kayumalue, **Sulteng**
15. UPPKB Datae, **Sulsel**
16. UPPKB Palangga, **Sulsel**
17. UPPKB Somba Opu, **Sulsel**
18. UPPKB Passo, **Maluku**

Baru 2022

1. UPPKB Air Haji, **Sumbar**
2. UPPKB Muara Tembesi, **Jambi**
3. UPPKB Merapi, **Sumsel**
4. UPPKB Senawar Jaya, **Sumsel**
5. UPPKB Padang Ulak Tanding, **Bengkulu**
6. UPPKB Blambangan Umpu, **Lampung**
7. UPPKB Wanareja, **Jateng**
8. UPPKB Ajibarang, **Jateng**
9. UPPKB Sedarum, **Jatim**
10. UPPKB Klakah, **Jatim**
11. UPPKB Trosobo, **Jatim**
12. UPPKB Watudodol, **Jatim**
13. UPPKB Marisa, **Gorontalo**
14. 25 UPPKB lainnya

Baru 2023

1. UPPKB Sungai Penuh, **Jambi**
2. UPPKB Kotabaru, **Sumsel**
3. UPPKB Cikande, **Banten**
4. UPPKB Gentong, **Jabar**
5. UPPKB, Banyudono, **Jateng**
6. UPPKB Taman Martani, **DIY**
7. UPPKB Kalibaru Manis, **Jatim**
8. UPPKB Singosari, **Jatim**
9. UPPKB Walenrang, **Sulsel**
10. UPPKB Bulu Dua, **Sulsel**
11. UPPKB Maccopa, **Sulsel**
12. 25 UPPKB lainnya

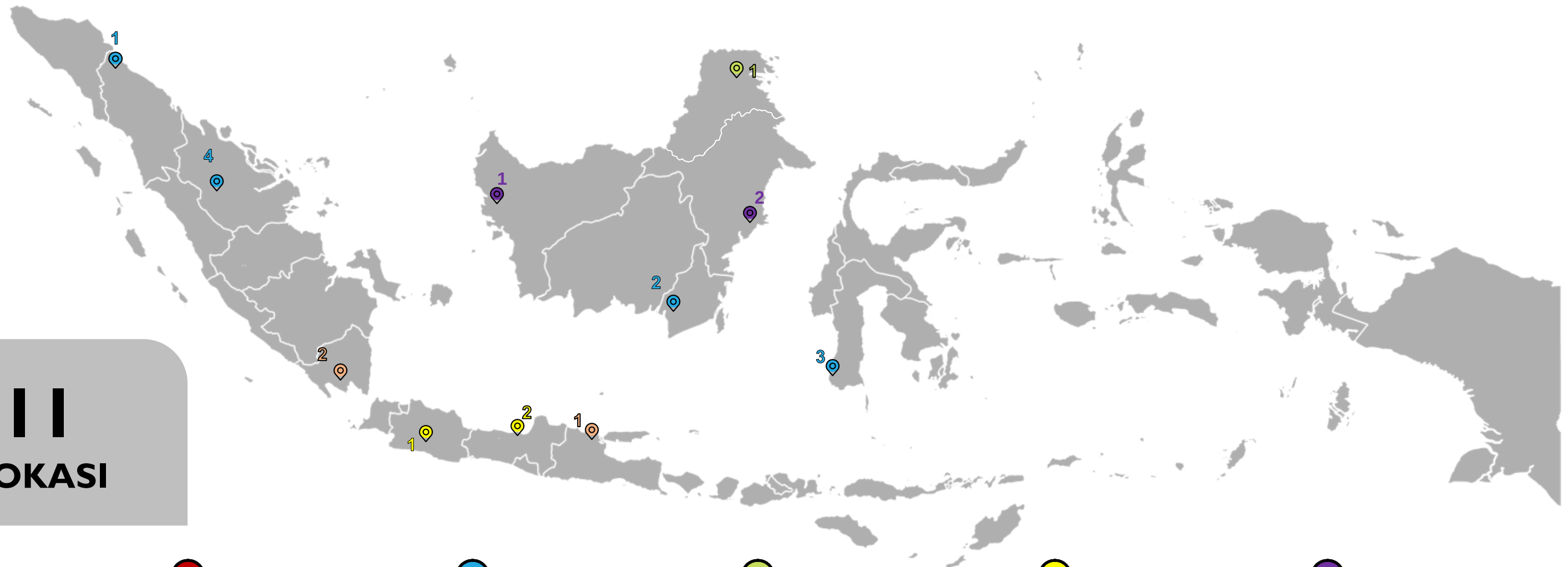
Baru 2024

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. UPPKB Jambi Merlung, Jambi | 15. UPPKB Watualo, NTT |
| 2. UPPKB Cibragalan, Jabar | 16. UPPKB Satong, Kalbar |
| 3. UPPKB Tanjung, Jateng | 17. UPPKB Pasar Panas, Kalsel |
| 4. UPPKB Subah, Jateng | 18. UPPKB Pineleng, Sulut |
| 5. UPPKB Kalitirto, DIY | 19. UPPKB Mayoa, Sulteng |
| 6. UPPKB Kulwaru, DIY | 20. UPPKB Moutong, Sulteng |
| 7. UPPKB Baureno, Jatim | 21. UPPKB Buntu Datu, Sulsel |
| 8. UPPKB Mojoagung, Jatim | 22. UPPKB Sajoanging, Sulsel |
| 9. UPPKB Widang, Jatim | 23. UPPKB Tana Batue, Sulsel |
| 10. UPPKB Widodaren, Jatim | 24. UPPKB Larompong, Sulsel |
| 11. UPPKB Trowulan, Jatim | 25. UPPKB Lumpue, Sulsel |
| 12. UPPKB Pojok, Jatim | 26. UPPKB Tonrokassi, Sulsel |
| 13. UPPKB Talun, Jatim | 27. 29 UPPKB lainnya |
| 14. UPPKB Rejos, Jatim | |



PEMBANGUNAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)

TA. 2020-2024



II
LOKASI

Lanjutan 2019

1. Project Prioritas I
2. Project Prioritas II
3. Project Prioritas III
4. dst

Baru 2020

1. Sumatera Utara
2. Kalimantan Selatan
3. Sulawesi Selatan
4. Riau

Baru 2021

1. Kalimantan Utara

Baru 2022

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah

Baru 2023

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Timur

Baru 2024

1. Jawa Timur
2. Lampung



PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN

TA. 2020-2024

23
LOKASI

Lanjutan 2019	Baru 2020	Baru 2021	Baru 2022	Baru 2023	Baru 2024
1. -	1. Lampung 2. Kalimantan Timur 3. Riau	1. Bali 2. Kalimantan Barat 3. Kalimantan Selatan 4. Kalimantan Tengah	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Jambi 5. Sumatera Selatan 6. Lampung	1. Banten 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Jawa Timur	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Gorontalo 4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Papua



PEMBANGUNAN TAMAN EDUKASI

TA. 2020-2024

6
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. -

Baru 2021

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah

Baru 2022

1. Jawa Timur

Baru 2023

1. Riau
2. Lampung

Baru 2024

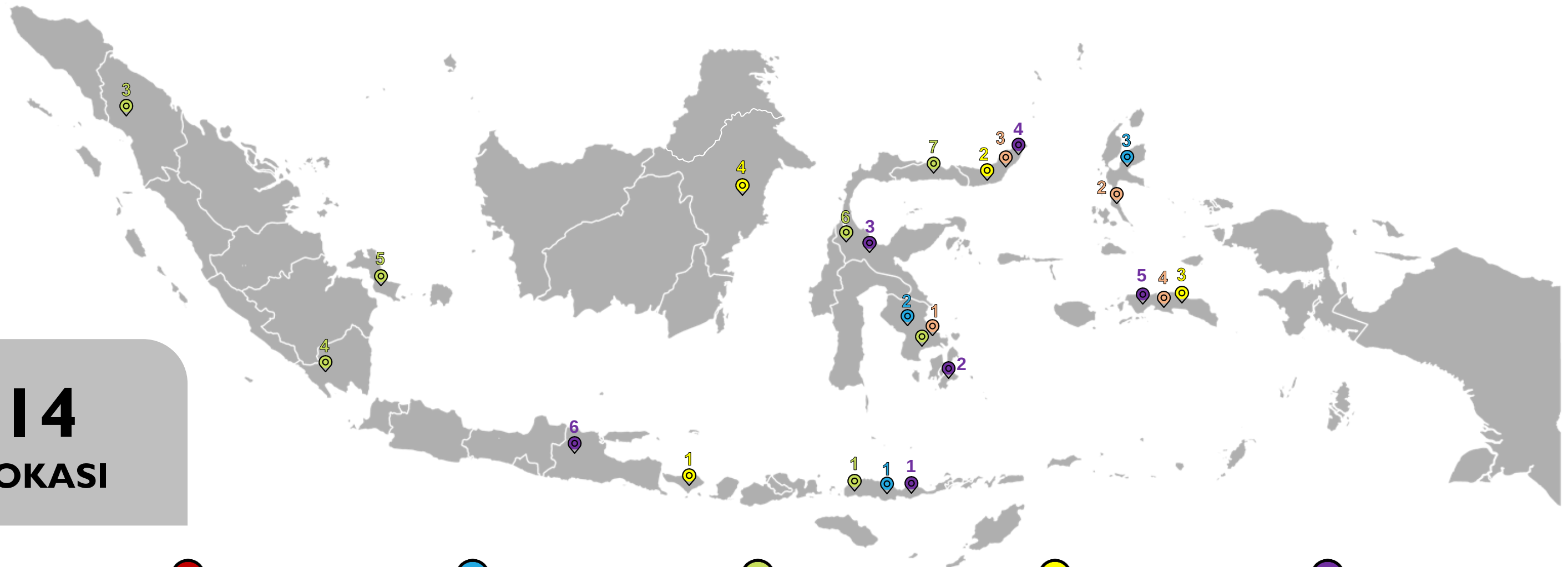
1. Kalimantan Utara



PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP)

TA. 2020-2024

14
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Nusa tenggara timur
2. Sulawesi tenggara
3. Maluku utara

Baru 2021

1. Nusa tenggara timur
2. Sulawesi tenggara
3. Sumatera utara
4. Lampung
5. Bangka Belitung
6. Sulawesi tengah
7. Gorontalo

Baru 2022

1. Bali
2. Sulawesi utara
3. Maluku
4. Kalimantan timur

Baru 2023

1. Nusa tenggara timur
2. Sulawesi tenggara
3. Sulawesi tengah
4. Sulawesi utara
5. Maluku
6. Jawa timur

Baru 2024

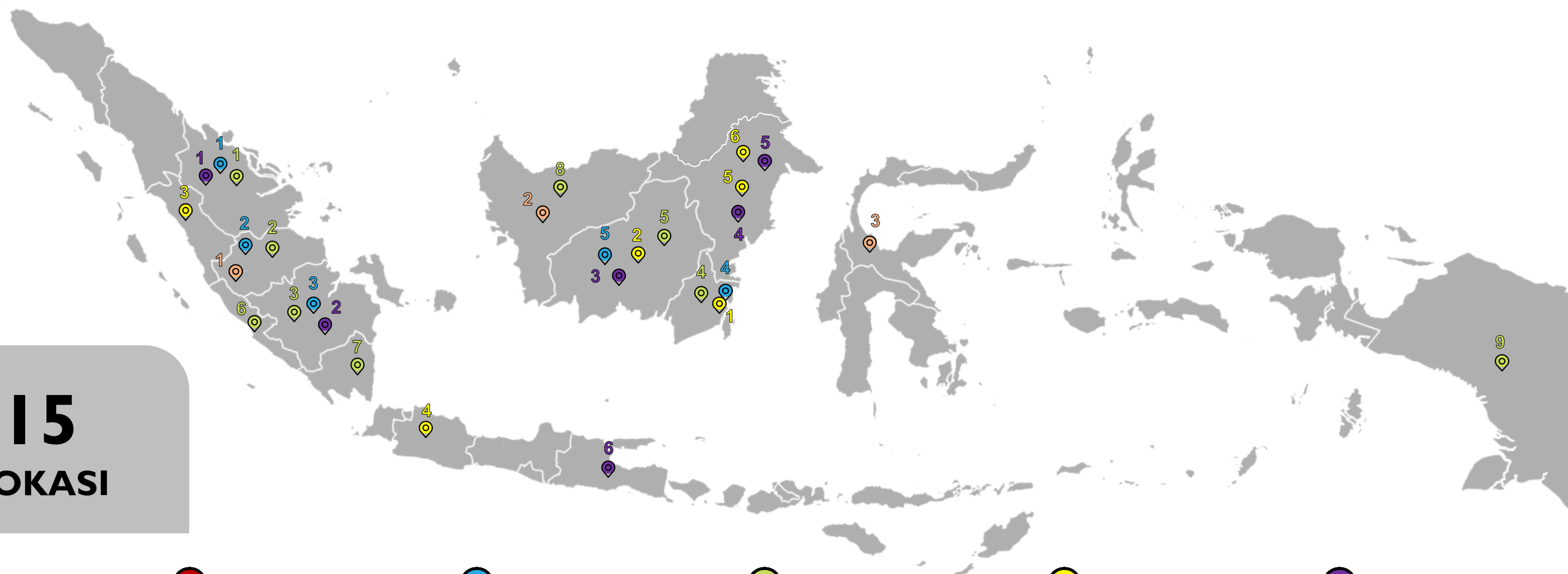
1. Sulawesi tenggara
2. Maluku utara
3. Sulawesi utara
4. Maluku



PEMBANGUNAN RAMBU SUNGAI DAN DANAU

TA. 2020-2024

15
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Riau
2. Jambi
3. Sumatera Selatan
4. Kalimantan Selatan
5. Kalimantan Tengah

Baru 2021

1. Riau
2. Jambi
3. Sumatera selatan
4. Kalimantan selatan
5. Kalimantan tengah
6. Bengkulu
7. Lampung
8. Kalimantan Barat
9. Papua

Baru 2022

1. Kalimantan selatan
2. Kalimantan tengah
3. Sumatera Barat
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Timur
6. Kalimantan Utara

Baru 2023

1. Riau
2. Sumatera selatan
3. Kalimantan tengah
4. Kalimantan timur
5. Kalimantan utara
6. Jawa Timur

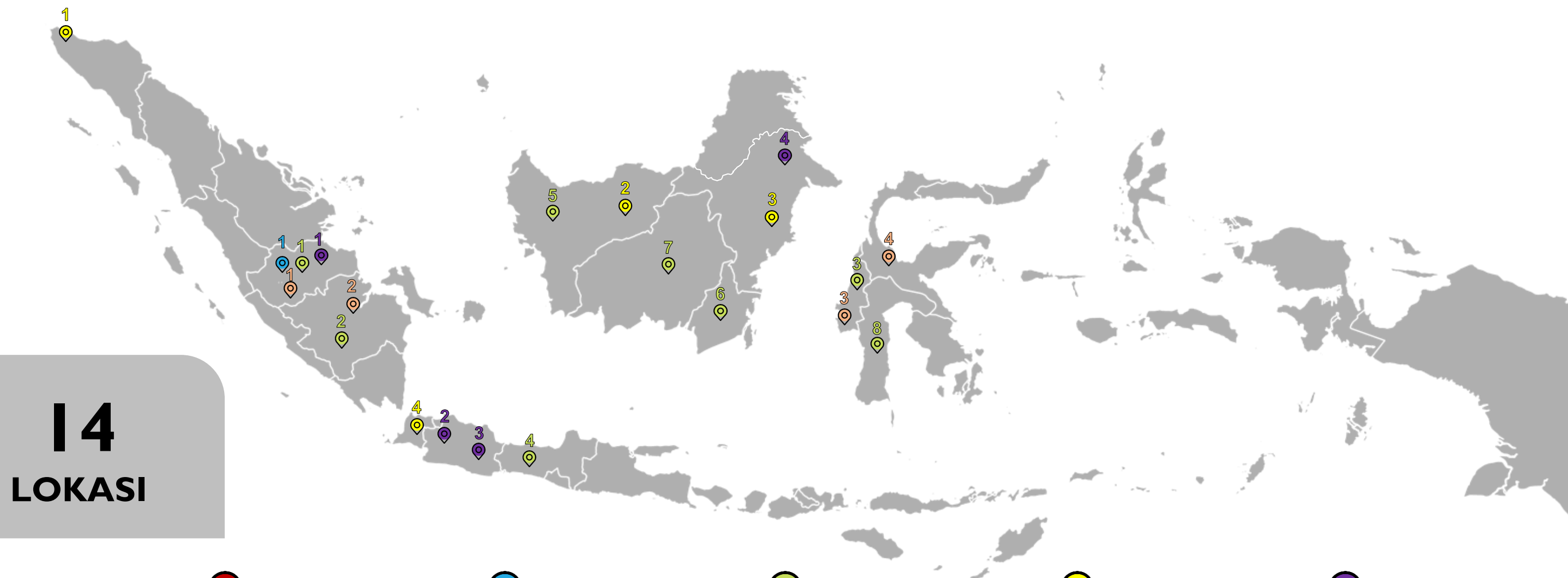
Baru 2024

1. Jambi
2. Kalimantan barat
3. Sulawesi Tengah



PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI

TA. 2020-2024



14
LOKASI

Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Jambi

Baru 2021

1. jambi
2. Sumatera Selatan
3. Sulawesi Barat
4. Jawa Tengah
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah
8. Sulawesi Selatan

Baru 2022

1. Aceh
2. Kalimantan barat
3. Kalimantan Timur
4. Banten

Baru 2023

1. Jambi
2. banten
3. Jawa Barat
4. Kalimantan Utara

Baru 2024

1. Jambi
2. Sumatera selatan
3. Sulawesi barat
4. Sulawesi tengah



PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN LALU LINTAS KAPAL SDP

TA. 2020-2024



5
LOKASI

Lanjutan 2019

I. -

Baru 2020

I. Danau Toba, **Sumut**

Baru 2021

I. Sungai Musi, **Sumsel**

Baru 2022

I. Asmat, **Papua**

Baru 2023

I. IKN/Balikpapan, **Kaltim**

Baru 2024

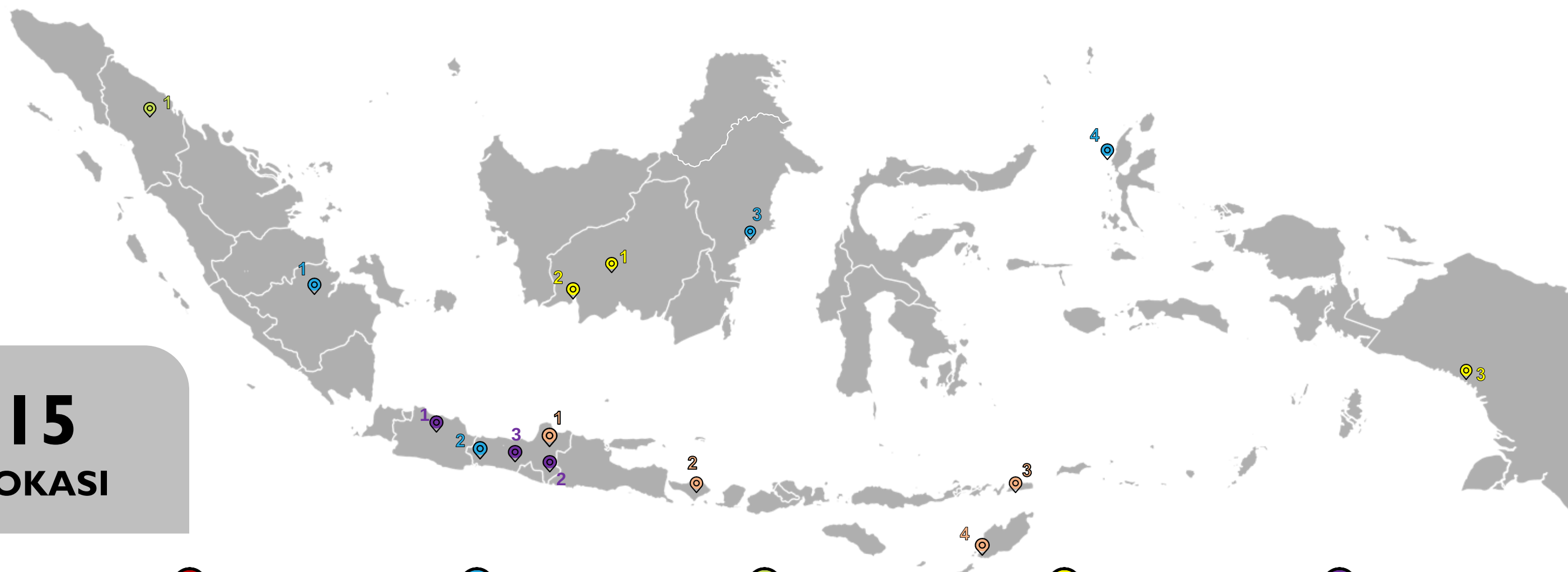
I. Sungai Sampit, **Kalteng**



PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI MULTIPURPOSE

TA. 2020-2024

15
LOKASI



Lanjutan 2019

1. -

Baru 2020

1. Sungai Musi
2. Sungai Serayu
3. PP. Kariangau
4. PP. Bastiong

Baru 2021

1. Danau Toba, Sumatera Utara

Baru 2022

1. Sungai Sampit
2. Sungai Kumai
3. Asmat

Baru 2023

1. Waduk Cirata
2. Waduk Gajah Mungkur
3. Waduk Wadas Lintang

Baru 2024

1. Waduk Kedungombo
2. Danau Batur
3. PP. Kalabahi
4. PP. Bolok